



**EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TERHADAP PEMBERDAYAAN
PETANI DI GAPOKTAN USAHA JAYA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO**

SKRIPSI

Oleh:

Khoirul Fanani

NIM 130910201039

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2017

“TIDAK BOLEH DIKUTIP”



**EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TERHADAP PEMBERDAYAAN
PETANI DI GAPOKTAN USAHA JAYA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Khoirul Fanani

NIM 130910201039

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

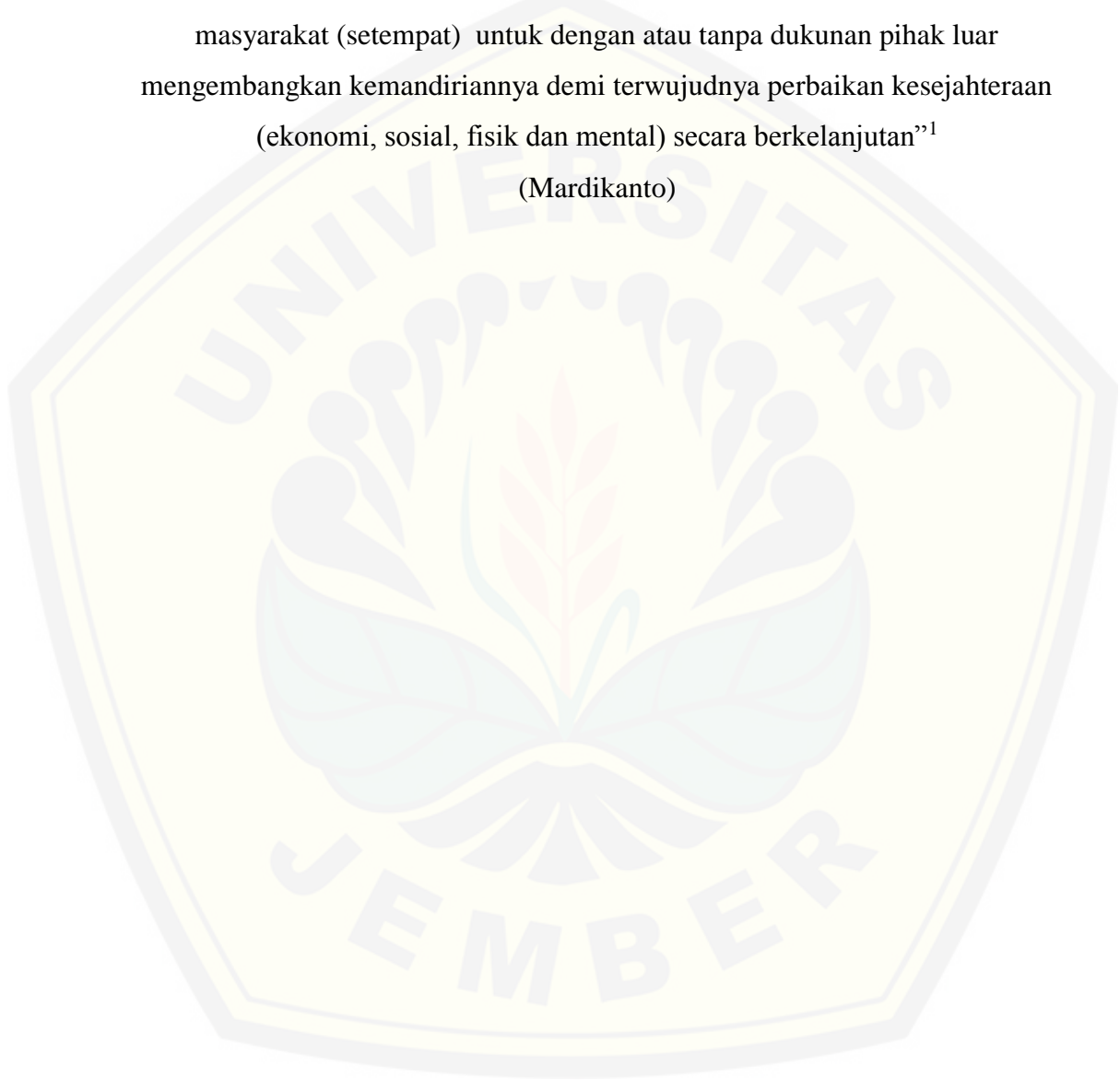
Dengan penuh rasa syukur, Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Moh Bahrun dan Ibunda (Alm) Mua'lifah yang telah memberikan semangat dan kasih sayangnya, yang telah berjerih payah dalam membesarkan anaknya, dan untaian do'a yang telah terpanjat dalam setiap akhir sujudnya
2. Sahabat dan teman-teman yang senantiasa kebersamai dalam suka maupun duka, yang telah memberikan perhatian melalui nasehat dan pertanyaan-pertanyaan untuk segera merampungkan tugas akhir
3. Guru-guru yang telah membimbing dan mengajarkan saya dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi
4. Alamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTTO

“Sebab hakikat dari pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan dan keberanian, serta memberikan kesempatan bagi upaya-upaya masyarakat (setempat) untuk dengan atau tanpa dukunan pihak luar mengembangkan kemandiriannya demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan (ekonomi, sosial, fisik dan mental) secara berkelanjutan”¹

(Mardikanto)



¹ Mardikanto, T. dan P. Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Penerbit Alfabeta

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirul Fanani

NIM : 130910201039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Karya Tulis Ilmiah berjudul:
“Evaluasi Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap)
Terhadap Pemberdayaan Petani Di Gapoktan Usaha Jaya Desa Sidomulyo
Kecamatan Silo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan
sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya
jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai
dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik
jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 November 2017

Yang menyatakan,

Khoirul Fanani

NIM 130910201039

SKRIPSI

**EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TERHADAP PEMBERDAYAAN
PETANI DI GAPOKTAN USAHA JAYA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO**

Oleh:

Khoirul Fanani

NIM 130910201039

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Supranoto, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Anwar, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Evaluasi Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Terhadap Pemberdayaan Petani Di Gapoktan Usaha Jaya Desa Sidomulyo Kecamatan Silo” karya Khoirul Fanani telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 29 September 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji,
Ketua,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

Pembimbing Utama,

Drs. Supranoto, M.Si
NIP 196102131988021001

Anggota I

Anggota II

M Hadi Makmur S.Sos.M.AP
NIP. 197410072000121001

Rachmat Hidayat S.Sos, MPA.Ph.D
NIP 198103222005011001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Evaluasi Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Terhadap Pemberdayaan Petani Di Gapoktan Usaha Jaya Desa Sidomulyo Kecamatan Silo; Khoirul Fanani, 130910201039; 2017; 81 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat di negara berkembang. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Meskipun masalah kemiskinan merupakan masalah klasik, namun dalam kenyataannya presentase kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2016, pada periode Maret 2016–September 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,15 juta sebaliknya daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,39 juta orang. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Pada September 2016, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebesar 62,24 persen dari seluruh penduduk miskin, sementara pada Maret 2016 sebesar 63,08 persen

Berdasarkan laporan Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2016 menunjukkan dari sembilan mata pencaharian utama, angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh pertanian. Selama ini, petani sering diidentikkan dengan kemiskinan. Terciptanya kondisi kemiskinan petani di wilayah perdesaan, salah satunya disebabkan karena faktor sulitnya penyediaan modal. Bahkan, keterbatasan akses terhadap modal (kredit) diidentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan, yang akhirnya aktivitas usaha agribisnis menjadi sulit berkembang dan memperoleh peningkatan laba. (Hermawan, 2015).

Pada tahun 2008, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah,

meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan, penyuluh dan penyelia mitratani, memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, dan meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses kepermodalan. Selain itu, program PUAP juga merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dan merupakan bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri yang melakukan penyaluran bantuan modal usaha dalam upaya menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran, yang diwujudkan dengan penerapan pola bentuk fasilitas bantuan penguatan modal usaha untuk petani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

Pelaksanaan program PUAP di Kabupaten Jember dimulai pada tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2015. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Jember, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, telah memberikan dana PUAP sebesar Rp.20,7 Miliar yang diberikan masing-masing Rp 100 juta kepada 207 Gapoktan yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Salah satu Gapoktan yang menonjol sebagai penerima program PUAP adalah Gapoktan Usaha Jaya yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo. Berdasarkan laporan Dinas Pertanian Kabupaten Jember tahun 2014, modal yang dimiliki oleh Gapoktan Usaha Jaya mencapai 800 juta lebih dan merupakan nilai modal tertinggi dibandingkan Gapoktan penerima PUAP di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jember

Sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat, penerima program PUAP mendapatkan pendampingan oleh PPL yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian dan juga mendapat pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pertanian. Berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, Sumadyo (2001) menawarkan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina lingkungan.

Hasil penelitian yang dilakukan secara kuantitatif pada Gapoktan Usaha Jaya dengan menggunakan aspek bina manusia dengan variabel sikap kewirausahaan, sikap profesionalisme, sikap kemandirian, posisi tawar menawar,

dan variabel bina usaha menunjukkan sebagian besar responden menganggap program PUAP berdampak pada variabel-variabel tersebut. Pada variabel sikap kewirausahaan, pendampingan program PUAP dianggap berdampak pada kemampuan petani dalam menentukan komoditas, keberanian mengambil resiko, dan berupaya melakukan perbaikan pada hasil pertanian.

Pada variabel sikap profesionalisme, program PUAP dianggap berdampak pada sikap kebanggan petani terhadap profesinya, menjaga etika dalam menjalankan profesinya, dan timbulnya keinginan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan pertanian. Pada variabel kemandirian, program PUAP dianggap berdampak pada kemandirian petani dalam memilih jenis komoditas yang akan ditanam, jenis pupuk, dan juga menentukan jumlah uang yang akan dipinjam secara mandiri. Pada variabel posisi tawar menawar, program PUAP dianggap berdampak pada kerjasama antar Gapoktan dengan berbagai institusi seperti institusi perbankan, institusi pendidikan, dan institusi pemerintahan. Pada variabel bina usaha, program PUAP dianggap berdampak pada pemahaman petani terkait dengan pemilihan komoditas usaha yang didasarkan pada kondisi pasar dan kondisi lingkungan, selain itu program PUAP juga dianggap berdampak pada sikap petani untuk berusaha menginvestasikan sebagian hasil pertanian.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Terhadap Keberdayaan Petani Di Gapoktan Usaha Jaya Desa Sidomulyo Kecamatan Silo”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Keberadaan dan dedikasi banyak orang merupakan bagian penting yang turut berperan atas selesainya karya ini. Karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Ardiyanto, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember beserta jajarannya Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III.;
2. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M. Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs. Abdul Kholiq Azari, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang turut memberikan dukungan, arahan, dan nasehat selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Bapak Drs. Supranoto, M.Si , selaku dosen pembimbing I yang telah memberi dukungan, bimbingan, saran, pikiran, waktu, dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Drs. Anwar, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah memberi dukungan, bimbingan, saran, pikiran, waktu, dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini;
6. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga menyempurnakan skripsi ini;

7. Sahabat saya sejak SMA, Fiqi Ardianto, Fatah Kerta Sholeh, Kukuh Lutfi, dan Khoiril Maqin yang mau menjadi wadah saya berkeluh kesah
8. Saudara sepengopian Iwan Kusumo, dan teman-teman Remas An Nuur, Agus, Mas Fajar, Sujarwo dan Mas Rizqon, Afif, Heru, Hakim, Farik dan Nabil atas pertanyaan “kapan sidang” yang memacu saya untuk segera merampungkan skripsi;
9. Keluarga Besar Administrasi Negara angkatan 2013 yang telah memberikan bantuan, semangat, dan teman diskusi khususnya Muajib Ardiansiah, Ardy Prasetyo, Ahmadi Imam Muslim, Hanik Rofiqoh, Heti Yusiana, Isni Fauziah dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu sehingga dapat membangun mental penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
10. Pak Bagong selaku bagian Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Jember atas kesediaan waktu untuk diwawancarai
11. Mas Firman, PPL Desa Sidomulyo yang telah mengantar saya untuk wawancara

Jember, 8 November 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERSEMBAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERNYATAAN | v |
| PENGESAHAN | vii |
| RINGKASAN | viii |
| PRAKATA | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penulisan | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Konsep Dasar | 10 |
| 2.2 Kebijakan Publik | 12 |
| 2.2.1 Definisi Kebijakan Publik..... | 12 |
| 2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik | 13 |
| 2.2.3 Tipologi Kebijakan Publik | 16 |
| 2.3 Pengertian Program | 19 |
| 2.4 Pemberdayaan Masyarakat | 21 |
| 2.4.1 Definisi | 21 |
| 2.4.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat | 23 |
| 2.4.3 Tujuan Pemberdayaan | 24 |
| 2.4.4 Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat..... | 26 |

| | |
|--|-----------|
| 2.5 Evaluasi Kebijakan | 29 |
| 2.5.1 Pengertian Evaluasi | 29 |
| 2.5.2 Tujuan Evaluasi | 29 |
| 2.5.3 Tipe Evaluasi | 30 |
| 2.5.3 Langkah-langkah Evaluasi..... | 31 |
| 2.5.4 Pendekatan Evaluasi | 31 |
| 2.5.5 Metode Evaluasi | 32 |
| 2.6 Dampak Kebijakan | 33 |
| 2.7 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) | 34 |
| 2.8 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) | 37 |
| BAB 3. METODE PENELITIAN | 40 |
| 3.1 Rancangan Penelitian | 41 |
| 3.2 Populasi dan Sampel | 41 |
| 3.3 Jenis dan Sumber data | 43 |
| 3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel | 44 |
| 3.4.1 Definisi Operasional Variabel..... | 44 |
| 3.4.2 Pengukuran Variabel..... | 47 |
| 3.5 Metode Analisis data | 48 |
| 3.5.1 Uji Validitas..... | 48 |
| 3.5.2 Uji Reliabilitas | 48 |
| 3.5.3 Analisis Data..... | 48 |
| 3.5.4 Kerangka Pemecahan Masalah | 50 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN | 51 |
| 4.1 Gambaran Umum Desa Sidomulyo | 51 |
| 4.1.1 Letak dan Keadaan Wilayah | 51 |
| 4.2 Keadaan Penduduk | 51 |
| 4.2.1 Keadaan Penduduk berdasarkan Jumlah dan Komposisi penduduk | 51 |
| 4.2.2 Keadaan Penduduk menurut Tingkat Pendidikan | 52 |
| 4.2.3 Keadaan Penduduk menurut Pekerjaan | 52 |
| 4.3 Profil Gapoktan Usaha Jaya | 53 |
| 4.4 Pelaksanaan Program PUAP di Gapoktan Usaha Jaya | 54 |

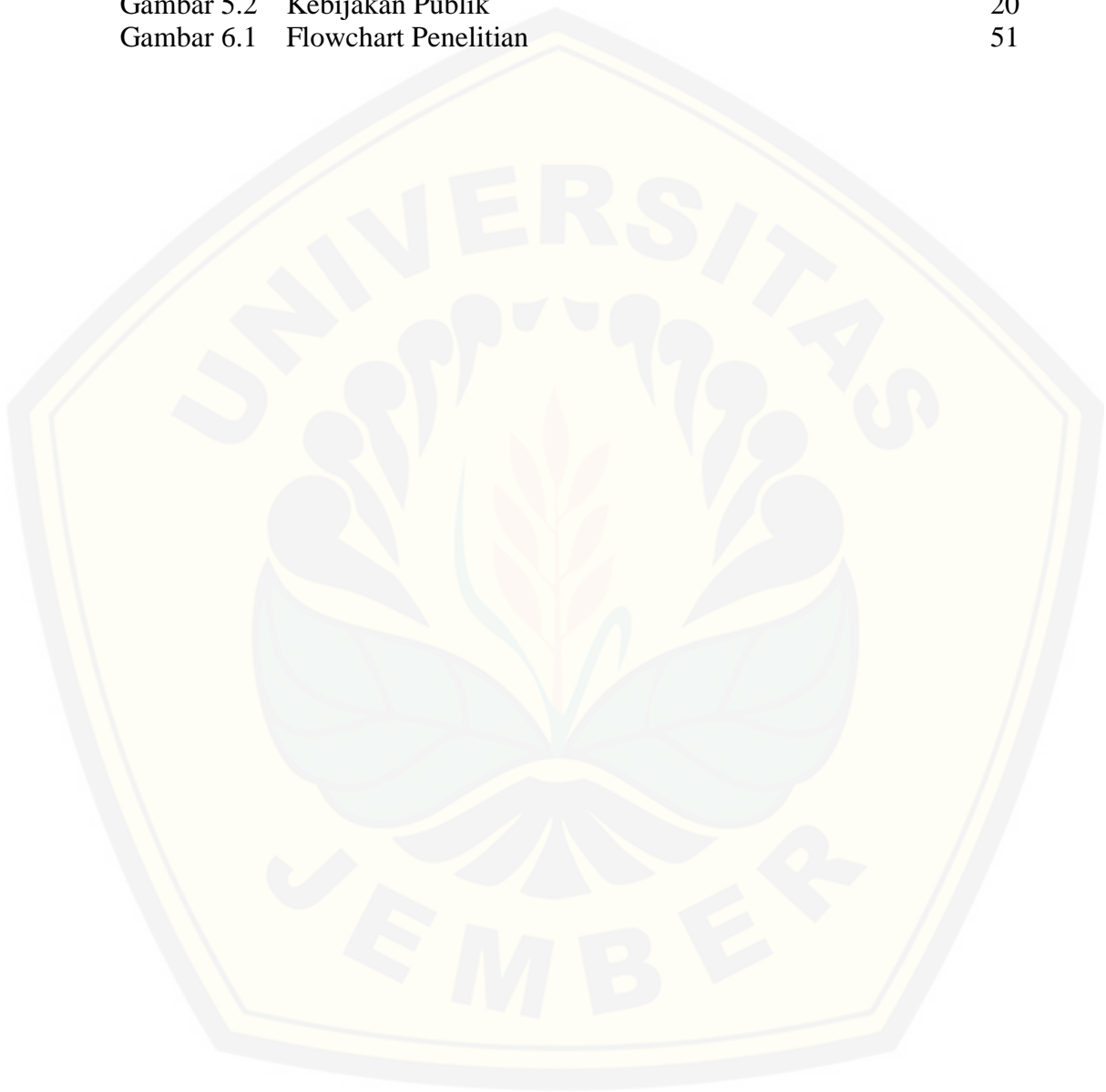
| | |
|---|------------|
| 4.4 Deskripsi Reponden | 55 |
| 4.4.1 Umur Responden | 56 |
| 4.4.2 Jenis Kelamin Responden | 56 |
| 4.4.3 Pendidikan Terakhir..... | 56 |
| 4.4.4 Demografi Responden Berdasarkan Keanggotaan Gapoktan..... | 57 |
| 4.5 Hasil Uji Kualitas Data | 57 |
| 4.6 Deskripsi Variabel Penelitian..... | 60 |
| 4.7 Pembahasan..... | 70 |
| BAB 5. PENUTUP | 75 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 75 |
| 5.2 Keterbatasan | 76 |
| 5.3 Saran | 76 |
| LAMPIRAN 1. KUESIONER..... | 77 |
| LAMPIRAN 2. HASIL REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN | 84 |
| LAMPIRAN 3. HASIL UJI VALIDITAS | 89 |
| LAMPIRAN 4. HASIL UJI RELIABILITAS..... | 94 |
| LAMPIRAN 5. GAPOKTAN PUAP KABUPATEN JEMBER | 96 |
| LAMPIRAN 6. DOKUMENTASI | 98 |
| LAMPIRAN 7. SURAT EDARAN KEMENTERIAN PERTANIAN | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 100 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1 Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia bulan Agustus 2016 berdasarkan sembilan mata pencarian utama | 2 |
| Tabel 1.2 Rincian Jumlah Penerima Program PUAP Kabupaten Jember | 5 |
| Tabel 1.3 Laporan Perkembangan dana PUAP Kab. Jember bulan Februari tahun 2014 | 7 |
| Tabel 1.4 Gapoktan PUAP dengan aset pelaporan keuangan surplus di Kabupaten Jember per bulan Februari 2014 | 8 |
| Tabel 2.1 Metodologi untuk Evaluasi Program | 35 |
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sidomulyo Pada Tahun 2015 | 55 |
| Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Desa Sidomulyo Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 55 |
| Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Umur | 59 |
| Tabel 4.4 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 60 |
| Tabel 4.5 Demografi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 60 |
| Tabel 4.6 Demografi Responden Berdasarkan Keanggotaan Gapoktan | 60 |
| Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas | 61 |
| Tabel 4.8 Rekapitulasi Uji Reliabilitas Data | 63 |
| Tabel 4.9 Deskripsi Variabel Sikap Kewirausahaan | 64 |
| Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Sikap Profesionalisme | 65 |
| Tabel 4.11 Deskripsi Variabel Sikap Kemandirian | 68 |
| Tabel 4.12 Deskripsi Variabel Posisi Tawar Menawar | 69 |
| Tabel 4.13 Deskripsi Variabel Bina Usaha | 71 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 5.1 Tahap-tahap kebijakan publik | 13 |
| Gambar 5.2 Kebijakan Publik | 20 |
| Gambar 6.1 Flowchart Penelitian | 51 |



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hasil evaluasi dampak pemberdayaan petani melalui program PUAP pada Gapoktan Usaha Jaya, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat di negara berkembang. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Meskipun masalah kemiskinan merupakan masalah klasik, namun dalam kenyataannya presentase kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi.

Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen), menurun 0,25 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang sebanyak 28,01 juta orang (10,86 persen). Pada periode Maret 2016–September 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,15 juta sebaliknya daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,39 juta orang. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Pada September 2016, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebesar 62,24 persen dari seluruh penduduk miskin, sementara pada Maret 2016 sebesar 63,08 persen

Berdasarkan laporan Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2016 menunjukkan dari sembilan mata pencaharian utama, angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh pertanian, dari 118 juta angkatan kerja pada bulan Agustus 2016, sebanyak 37 juta bekerja dibidang pertanian kedua dibidang perdagangan sebanyak 26 juta (23%), ketiga dibidang jasa sebanyak 19 juta (16%), keempat dibidang Industri sebanyak 15 juta (13%), kelima dibidang bangunan sebanyak 79 juta, keenam bidang angkutan sebanyak 5,6 juta, ketujuh dibidang keuangan sebanyak 3,5 juta, kedelapan pertambangan sebanyak 1,4 juta, dan terakhir dibidang listrik, gas dan air sebanyak 357 ribu.

Tabel 1.1 Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia bulan Agustus 2016 berdasarkan sembilan mata pencarian utama

| Mata pencarian utama | 2016 | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----|
| | Laki laki | Perempuan | Total | % |
| Pertanian, kehutanan, perburuhan dan perikanan | 24042918 | 13727247 | 37770165 | 32% |
| Pertambangan dan penggalian | 1305864 | 170620 | 1476484 | 1% |
| Industri pengolahan | 8853339 | 6686895 | 15540234 | 13% |
| Listrik, gas dan air | 320966 | 36241 | 357207 | 0% |
| Bangunan | 7813419 | 165148 | 7978567 | 7% |
| perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel | 12824295 | 13865335 | 26689630 | 23% |
| Angkutan, pergudangan, dan komunikasi | 5193073 | 415676 | 5608749 | 5% |
| keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan | 2496191 | 1035334 | 3531525 | 3% |
| Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan | 10093562 | 9365850 | 19459412 | 16% |
| Total | 72943627 | 45468346 | 118411973 | |

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus, BPS 2016, data diolah

Dari data tersebut dapat dipahami bahwa petani merupakan mata pencaharian utama masyarakat Indonesia, sementara kemiskinan paling banyak terjadi di pedesaan, sehingga kemiskinan pedesaan erat kaitannya dengan kemiskinan petani. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Terciptanya kondisi kemiskinan petani di wilayah pedesaan, salah satunya disebabkan karena faktor sulitnya penyediaan modal. Bahkan, keterbatasan akses terhadap modal (kredit) diidentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan, yang akhirnya aktivitas usaha agribisnis menjadi sulit berkembang dan memperoleh peningkatan laba. (Hermawan, 2015).

Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian pada tahun 2008 mengimplementasikan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 16/Permentan/OT.140/2/2008. Program PUAP didesain untuk membantu para petani yang kesulitan mendapatkan bantuan modal usaha, bentuk program adalah dengan memberikan bantuan modal kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

sebesar 100 juta rupiah, selain pemberian modal usaha kepada Gapoktan, bentuk kegiatan dari program PUAP adalah dengan melakukan pendampingan kepada para petani melalui Penyelia Mitra Tani (PMT). Berdasarkan surat edaran sebagaimana yang terlampir pada Lampiran 7, secara nasional, jumlah gapoktan penerima dana PUAP tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 52.186 gapoktan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dengan total jumlah dana sebesar Rp 5,21 Triliun. Pada tahun 2016 program PUAP sudah tidak dilaksanakan lagi.

Program PUAP memiliki tujuan antara lain:

1. untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;
2. meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan, penyuluh dan penyelia mitratani;
3. memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis;
4. meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses kepermodalan.

Bantuan Program PUAP disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berada di tiap-tiap desa. Gapoktan pelaksana Program PUAP merupakan organisasi petani di perdesaan yang dibentuk secara musyawarah dan mufakat untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha dengan terdiri dari petani (pemilik dan penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani miskin di perdesaan.

Keberlanjutan program PUAP ditentukan oleh unsur yang terdapat dalam Gapoktan. Dengan peningkatan peran strategis Gapoktan sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP, maka diharapkan petani mampu meningkatkan kualitas kehidupannya melalui usaha-usaha pengembangan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia (petani), meningkatkan skala usaha dan menciptakan efisiensi dalam kegiatannya, yang pada gilirannya mampu meningkatkan produktivitasnya. (Anggraini, 2012)

Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) merupakan salah satu program pemberdayaan. Artinya kesuksesan program tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar lembaga yang terkait. Program PUAP bukan hanya program yang berasal dari pemerintah saja namun terdapat aspek pemberdayaan. Sasaran program ini adalah terbinanya masyarakat desa yang mandiri dengan usaha pertanian. Melalui pemberdayaan masyarakat program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) sektor pertanian diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan menanggulangi angka kemiskinan daerah pedesaan. Adanya kebijakan pemberdayaan petani dengan peran pemerintah serta kelembagaan dengan lebih memfokuskan bagaimana peran pemerintah dan kerjasama antar kelembagaan dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat petani dapat mensejahterakan kehidupan petani, menyelesaikan permasalahan yang timbul serta mampu meningkatkan pendapatan daerah sektor pertanian guna peningkatan pembangunan di sektor pertanian. (Asnida, 2014)

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, Sumadyo (2001) merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri Bina, yakni bina manusia, bina usaha, dan bina lembaga. Bina manusia memfokuskan pada upaya peningkatan kemampuan masyarakat dan peningkatan posisi tawar menawar, bina usaha berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sementara bina lingkungan adalah upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan (areal kerja) maupun yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penanaman modal/ perseorangan.

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten penerima program PUAP. Pelaksanaan program PUAP di Kabupaten Jember dimulai sejak tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2015. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Jember, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, telah memberikan dana PUAP sebesar Rp.20,7 Miliar yang diberikan masing-masing Rp 100 juta kepada 207 Gapoktan yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jember.

Tabel 1.2 Rincian Jumlah Penerima Program PUAP Kabupaten Jember

| Tahun | Jumlah | Dana PUAP |
|-------|--------|-----------|
|-------|--------|-----------|

| | Kecamatan | Desa | Gapoktan | (Rp. Milyar) |
|-------|-----------|------|----------|--------------|
| 2008 | 16 | 35 | 35 | 3,5 |
| 2009 | 11 | 28 | 28 | 2,8 |
| 2010 | 21 | 36 | 36 | 3,6 |
| 2011 | 21 | 26 | 26 | 2,6 |
| 2012 | 12 | 22 | 22 | 2,2 |
| 2013 | 23 | 35 | 35 | 3,5 |
| 2014 | 9 | 9 | 9 | 0,9 |
| 2015 | 16 | 16 | 16 | 1,6 |
| Total | | | | 2,7 |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jember 2015 (diolah)

Dari keseluruhan gapoktan penerima di Kabupaten Jember, sampai dengan tahun 2014 sebanyak 54 atau sebesar 33 persen telah menjadi Lembaga Keuangan Mikro atau LKM, data gapoktan LKM dapat dilihat di Lampiran 5.

Penentuan Gapoktan yang berkembang menjadi LKM ditentukan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Pengembangan LKM-A Pada Gapoktan PUAP. LKM merupakan suatu Lembaga Keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan

Dalam pelaksanaannya, program PUAP di Kabupaten Jember masih memiliki beberapa permasalahan, di antaranya adalah terdapat gapoktan yang belum menyalurkan dana bantuan kepada anggota petaninya, hal tersebut dikarenakan pengurus gapoktan tidak berani menyalurkan bantuan karena status gapoktan yang tidak aktif dan tidak memiliki kas sama sekali, hal ini terjadi di gapoktan yang berada di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu perangkat Desa Tegalsari pada tanggal 02 November 2016.

“Desa Tegalsari memang mendapatkan bantuan PUAP sejak tahun 2013, namun selama ini bantuan tersebut masih belum dicairkan, alasannya karena memang aktivitas gapoktan di Tegalsari masih vakum karena para petani lebih fokus kepada kelompok tani masing-masing. Alasan lainnya karena dengan peraturan yang begitu

ketatnya, dari gapoktan sendiri kurang berani mencairkan karena takut tidak mampu mengelola bantuan”

Hal tersebut jelas bertentangan dengan kriteria penerima program PUAP, sebab dalam Permentan nomor 06 Tahun 2015 Bab IV tentang seleksi desa dan Gapoktan penerima PUAP menjelaskan bahwa salah satu kriteria penerima adalah desa tersebut memiliki gapoktan yang sudah aktif.

Masalah lainnya adalah, terdapat gapoktan yang setelah mendapat bantuan PUAP, ternyata tidak berhasil mengembangkan bantuan dan justru mengalami penurunan modal dari modal awal. Berikut beberapa gapoktan yang mengalami penurunan modal bantuan PUAP terburuk berdasarkan Laporan Perkembangan dana PUAP Kabupaten Jember bulan Februari tahun 2014

Tabel 1.3 Laporan Perkembangan dana PUAP Kab. Jember bulan Februari tahun 2014

| No | Kec | Desa | Gapoktan | Tahun PUAP | Aset Awal | Aset Pelaporan |
|----|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------|
| 1 | Rambipuji | Rambigundam | Karya Mandiri | 2009 | 100 juta | 3 juta |
| 2 | Mayang | Mayang | Nyata | 2010 | 100 juta | 5 juta |
| 3 | Kalisat | Plalangan | Makmur | 2010 | 100 juta | 5 juta |
| 4 | Sukowono | Pocangan | Bina Tani | 2009 | 100 juta | 6 juta |
| 5 | Mayang | Sidomukti | Tirta Melati | 2008 | 100 juta | 6,3 juta |

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Jember, data diolah

Meskipun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program PUAP, namun berdasarkan laporan keuangan Gapoktan PUAP dari Dinas Pertanian Kabupaten Jember tahun 2014, terdapat beberapa gapoktan yang mampu meningkatkan modal awal bantuan program PUAP. Diantaranya dapat dilihat pada

tabel 1.4. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Gapoktan Usaha Jaya merupakan Gapoktan dengan peningkatan modal tertinggi. Dari 100 juta ditahun 2008, dapat ditingkatkan menjadi 813 juta pada tahun 2014.

Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu pendamping pertanian Kabupaten Jember, bapak Sholeh, mengatakan bahwa Gapoktan Usaha Jaya merupakan Gapoktan yang berhasil dalam pengelolaan keuangan, berikut hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 10 Desember 2016.

“Gapoktan di Sidomulyo itu bagus, dulu sebelum mendapatkan bantuan, aktivitas di Gapoktan tersebut biasa saja, baru setelah mendapat bantuan program, mulai banyak aktivitas, selama tiga tahun setelah mendapat bantuan PUAP, Gapoktan Usaha Jaya dapat berkembang cukup pesat”.

Tabel 1.4 Gapoktan PUAP dengan aset pelaporan keuangan surplus di Kabupaten Jember per bulan Februari 2014

| No | Gapoktan | Desa | Kecamatan | Tahun PUAP | Aset Awal | Aset Pelaporan |
|----|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------------|
| 1 | Usaha Jaya | Sidomulyo | Silo | 2008 | 100 juta | 813 juta |
| 2 | Ketan Mas | Pontang | Ambulu | 2008 | 100 juta | 224 juta |
| 3 | Subur | Darsono | Arjasa | 2009 | 100 juta | 211 juta |
| 4 | Jaya Makmur | Sruni | Jenggawah | 2009 | 100 juta | 190 juta |
| 5 | Sejahtera | Rowosari | Sumberjambe | 2009 | 100 juta | 183 juta |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jember 2014, data diolah

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Firman selaku Pendamping Gapoktan Usaha Jaya pada wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 16 Januari 2017, mengatakan:

“Gapoktan Usaha Jaya dulu nol, nggak punya apa-apa, di desa dulu untuk mendapatkan pupuk saja susah, kemudian kita dapat bantuan PUAP dan dapat mengelola usaha sedikit demi sedikit untuk usaha, kemudian setelah dapat mengembangkan modal kita dipercaya oleh perbankan dan juga mendapat bantuan dengan Unej, Dinas Pertanian dan perkebunan, kemudian Dinas Koperasi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas kemudian membuat penulis tertarik untuk mengkaji evaluasi dampak program PUAP pada Gapoktan Usaha Jaya yang berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak pemberdayaan petani melalui program PUAP pada Gapoktan Usaha Jaya Desa Sidomulyo Kecamatan Silo ditinjau dari aspek bina manusia dan bina usaha.?”

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian merupakan hasil yang akan dicapai dari perumusan masalah yang ditentukan. Tujuan penelitian dimaksudkan agar penulis memiliki arah yang jelas. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah, “Untuk mengetahui dampak pemberdayaan petani melalui program PUAP pada Gapoktan Usaha Jaya berdasarkan aspek manusia dan usaha”.

1.4 Manfaat Penelitian

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:49) menjelaskan bahwa manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian yang hendak penulis capai meliputi manfaat bagi akademis, manfaat bagi instansi, dan manfaat bagi pribadi penulis.

a. Manfaat Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan bacaan, referensi kajian dan rujukan akademis dalam perspektif Kebijakan Publik bagi pengembangan studi Ilmu Administrasi Negara.

b. Manfaat Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak Dinas Pertanian untuk melihat sejauh mana dampak pemberdayaan petani melalui program PUAP

c. Manfaat Bagi Pribadi

Manfaat yang didapat oleh penulis di dalam penelitian ini adalah bisa menambah pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan di bangku kuliah yang berkaitan dengan kebijakan publik terutama tentang evaluasi dalam implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berpikir peneliti. Wardiyanta (2006:9) mengemukakan bahwa dalam sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau antara abstraksi dengan realitas. Pandangan lain mengenai konsep yang dikemukakan oleh Silalahi (2012:112)

Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori dan konsep yang terkait dengan Dampak Program PUAP terhadap Pemberdayaan Petani pada Gapoktan Usaha Jaya, Desa Sidomulyo Kecamatan Silo. Teori tersebut digunakan oleh peneliti karena dianggap sesuai dengan paradigma yang digunakan oleh peneliti. Berdasarkan penjelasan tersebut konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan Publik

Teori Kebijakan Publik dalam skripsi ini digunakan untuk menjelaskan bahwa Program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) merupakan bagian dari kebijakan publik. Sebab, aktor utama dalam pelaksanaan program PUAP adalah pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pertanian. Hal tersebut sesuai dengan definisi kebijakan publik yang dinyatakan oleh Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) bahwa “Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. Kebijakan publik merupakan suatu proses yang mencakup dari perumusan, implementasi sampai evaluasi. Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan pada tahapan evaluasi kebijakan.

b. Program dalam Kebijakan

Konsep Program dalam skripsi ini digunakan untuk menjelaskan definisi program yang dimaksud oleh peneliti serta untuk menjelaskan keterkaitannya dengan kebijakan publik. Menurut Wahab (2008:177), program dapat diartikan sebagai kebijakan-kebijakan publik yang pada umumnya masih abstrak berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran dan berbagai

macam sarana (sebagaimana dapat kita lihat dalam Garis Besar Haluan Negara) – diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih operasional yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Maka dapat dipahami bahwa adanya program adalah kepanjangan/ turunan dari suatu kebijakan yang memiliki tujuan-tujuan yang kurang lebih sama. Program menjadi penerus atau penunjang bagi kebijakan agar dapat tersampaikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan khususnya dan untuk masyarakat luas.

Sementara itu, Karding (2008:21) menjelaskan bahwa program adalah unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Anderson (2011) dalam Nugroho (2012:151) membagi kebijakan publik menjadi lima jenis yakni *Constituent*, *Distributive*, *Regulatory*, *Self Regulatory*, dan *Redistributive*. Dalam skripsi ini program yang akan dievaluasi merupakan bagian dari kebijakan distributif, kebijakan distributif menurut Nugroho (2012:152) adalah kebijakan yang berkenaan dengan alokasi layanan atau manfaat untuk segmen atau kelompok masyarakat tertentu dari suatu populasi, dalam hal ini program PUAP dikhususkan kepada petani yang tergabung dalam Gapungan Kelompok Tani. PUAP merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dan merupakan bagian dari program PNPM mandiri. Teori pemberdayaan masyarakat dalam skripsi ini digunakan untuk menjelaskan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Konsep pemberdayaan masyarakat dalam skripsi ini akan menjelaskan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari dua aspek, yakni aspek manusia dan aspek usaha sebagaimana yang dijelaskan oleh Sumadyo (2011).

d. Evaluasi kebijakan

Evaluasi merupakan suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan (Suharyadi, 2007). Dalam skripsi ini teori evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana program PUAP berdampak pada upaya pemberdayaan petani. Tipe evaluasi yang digunakan adalah *Ex Post Evaluation*, dengan metode yang digunakan *Single program after only*

2.2 Kebijakan Publik

Teori Kebijakan publik dalam skripsi ini digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara Program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) dengan kebijakan publik.

2.2.1 Definisi Kebijakan Publik

. Dalam ilmu administrasi publik, kebijakan publik dimaknai beragam. Menurut Anderson yang dikutip oleh Winarno (2012:19) menyampaikan bahwa “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Menurut Friedrich yang dikutip oleh Winarno (2012:20), Kebijakan adalah:

“suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan. Atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”

Dengan demikian, konsep kebijakan menurut definisi tersebut dapat dipahami sebagai suatu keputusan untuk melakukan sesuatu dengan memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Menurut Thomas Dye (1981:1) dikutip dari Subarsono (2005:2) kebijakan publik adalah “Apapun pilihan pemerintah

untuk melakukan atau tidak melakukan” Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan.

Definisi dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa:

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada *status quo*, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik.

Sedangkan James Anderson dikutip dari Subarsono (2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Dari definisi di atas tentu kebijakan publik merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi dari para aktor dari dalam dan faktor dari luar pemerintah. Berikut adalah tahap-tahap kebijakan publik



Gambar 5.1 Tahap-tahap kebijakan publik
Sumber: Winarno (2012:36)

Menurut Winarno (2012:36-37) dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pada tahap penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Pada tahap ini terdapat suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah yang karena alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
2. Pada tahap formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah-masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternative/policy option) yang ada.
3. Tahap adopsi kebijakan, dari sekian alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antar direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap implementasi kebijakan, suatu kebijakan hanya menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Pada tahap implementasi berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari pelakasan (implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
5. Pada tahap evaluasi kebijakan, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan

yang telah dibuat telah mampu memecahkan masalah, kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Proses pembuatan sebuah kebijakan publik merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung sesuai dengan alur yang bergerak secara teratur. Kebijakan publik berangkat dari isu atau masalah-masalah yang muncul dari masyarakat yang kemudian dikaji dan dievaluasi secara berkala melihat kondisi yang memang benar-benar dianggap relevan untuk dijadikan suatu kebijakan publik. Dari proses tersebut muncul alternatif-alternatif yang menjadi pilihan-pilihan untuk melakukan perumusan kebijakan publik. Setelah itu muncul kebijakan publik yang menjadi implementasi kebijakan publik. Setelah itu muncul kebijakan publik yang menjadi implementasi kebijakan publik. Dari implementasi kebijakan publik dievaluasi dan dilihat kembali untuk menyesuaikan dengan keadaan masalah yang muncul.

Kebijakan Publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Easton (1965:212) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu;”para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya.” Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah: orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. *Pertama*, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada pelaku yang berubah atau acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan

peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau akan dikerjakan. Jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar suatu regulasi yang minimum yang telah ditetapkan tetapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan dalam perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak diatur perundang-undangan. Ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan.

Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Terakhir, *kelima*, kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Anggota masyarakat dapat menerima sebagai sesuatu yang sah bahwa pajak haruslah dibayar, pengontrolan import harus dipatuhi, dan peraturan antimonopoli harus diikuti, bila tidak menginginkan adanya resiko didenda, hukuman penjara, atau sanksi-legal lainnya yang dapat dijatuhkan. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

2.2.3 Tipologi Kebijakan Publik

Menurut Anderson yang dikutip dalam Agustino (2012:86) Para ilmuwan politik dan ilmuwan Administrasi Publik telah mengembangkan sejumlah bentuk (tipologi) umum untuk mengelompokkan kebijakan-kebijakan publik. Pengembangan pemahaman bentuk kebijakan publik sangat diperlukan oleh karena

akan membantu kita dalam mengetahui beberapa perbedaan antara kebijakan (policies) dan penggeneralisasian kebijakan. Tipologi tradisional yang telah banyak digunakan, meliputi: Kebijakan Substantif (misalnya: kebijakan perburuhan, kesejahteraan, hak-hak sipil, utusan luar negeri); Kebijakan Institusional (kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, kebijakan antar departemen), dan Kebijakan Time-Period (era-perjanjian baru, kebijakan Pasca-Perang Dunia II).

Namun ketika perubahan sosial bergerak secara fluktuatif, pendekatan tradisional ini tidak lagi mendapat perhatian cukup serius. Kini banyak sarjana mengembangkan bentuk-bentuk baru guna memahami esensi dari kebijakan publik ke dalam lima bentuk. Di bawah ini dipaparkan kelima bentuk kebijakan publik yang memiliki maksudnya masing-masing, sesuai dengan guna yang melekat dalam dirinya (Agustino, 2012:87)

e. Kebijakan Substantif dan Kebijakan Prosedural

Pertama, bentuk kebijakan dapat diklasifikasikan menjadi Kebijakan Substantif atau Prosedural. Kebijakan Substantif meliputi kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, seperti: pendidikan, kesehatan, bantuan bagi usaha kecil menengah, atau pembayaran keuntungan bagi kesejahteraan rakyat, dan lain-lain. Kebijakan substantif pada dasarnya memberi tekanan pada *subject matter* dari apa yang dibutuhkan oleh warga. Sedangkan, kebijakan prosedural, yang jelas, meliputi siapa yang akan melaksanakan atau bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan. Jadi yang membedakan antara Kebijakan Substantif atau Kebijakan Prosedural adalah dengan melihat konten kebijakan itu sendiri. Apabila isi kebijakan lebih mengarah pada upaya pengentasan suatu masalah yang tengah dialami oleh warga masyarakat, maka dapat dipastikan kebijakan tersebut adalah kebijakan substantif. Tapi ketika konten kebijakan itu hanya menyampaikan siapa yang harus melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ia termasuk dalam kategori kebijakan prosedural.

f. Kebijakan Liberal dan Kebijakan Konservatif

Kebijakan Liberal adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan sosial mendasar terutama diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan (*civil liberties and civil right*). Lebih jauh, kebijakan liberal menghendaki pemerintah melakukan koreksi atas ketidakadilan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada aturan-aturan pemerintah sebelumnya. Kebijakan konservatif lebih menekankan pada aturan sosial yang mereka anggap sudah baik dan mapan, jadi upaya untuk melakukan perubahan sosial tidak perlu untuk dilakukan (mempertahankan *status quo*).

g. Kebijakan Distributif, Kebijakan Redistributif, Kebijakan Regulator, dan Kebijakan *Self-Regulatory*

Pengelompokan dalam kebijakan ini didasarkan pada dampak sosial dan hubungannya dengan pembentukan kebijakan. Kebijakan distributif terdiri dari penyebaran pelayanan atau keuntungan pada sektor-sektor khusus, baik untuk individu, kelompok-kelompok kecil, dan komunitas-komunitas tertentu. Beberapa kebijakan distributif dapat memberi keuntungan pada hanya satu atau beberapa orang, seperti: kasus jaminan pinjaman dan subsidi pada operasi dan konstruksi. Yang lainnya dapat memberikan keuntungan pada banyak orang, seperti: beras untuk rakyat miskin, kartu sehat, bantuan langsung dana kompensasi BBM, dan lain-lain.

Kebijakan redistributif termasuk usaha hati-hati yang dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan alokasi dana dari kekayaan, pendapatan, pemilihan atau hak-hak diantara kelompok-kelompok penduduk, misalnya: dari kelompok kaya ke kelompok miskin.

Kebijakan regulator adalah kebijakan tentang penggunaan pembatasan atau larangan perbuatan atau tindakan bagi orang atau kelompok orang. Kebijakan ini pada dasarnya bersifat mengurangi kebebasan seseorang atau sekelompok orang untuk berbuat sesuatu. Misalnya, pembatasan penjualan obat-obatan jenis tertentu di pasar bebas, larangan untuk menjual senjata api secara bebas di pasaran, dan larangan untuk membuang limbah di tempat-tempat umum.

Kebijakan *Self-Regulatory* adalah semacam peraturan kebijakan yang berupaya untuk membatasi atau mengawasi beberapa bahan atau kelompok. Kebijakan *self regulatory* biasanya dicari dan didukung oleh sekelompok aturan sebagai alat untuk melindungi atau menawarkan kepentingan mereka sendiri. Contoh dari kebijakan ini adalah kebijakan tentang Surat Izin Mengemudi.

h. Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolis

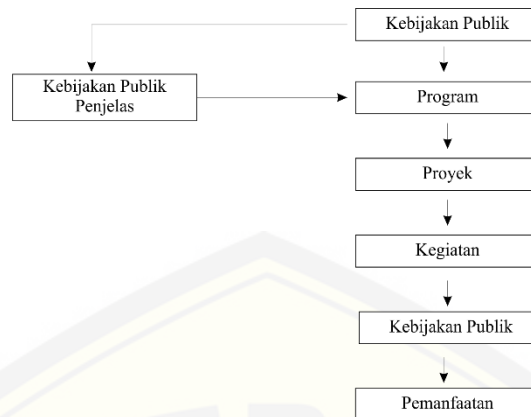
Kebijakan material adalah kebijakan yang berupaya untuk menyediakan sumber penghasilan yang nyata atau kekuasaan yang sesungguhnya kepada orang-orang yang diuntungkan, atau memberikan kerugian yang sesungguhnya bagi siapa yang terkena kerugian. Secara sederhana, kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Sedangkan kebijakan simbolis membagikan keuntungan atau kerugian yang mempunyai dampak kecil pada manusia.

i. Kebijakan Kolektif dan Kebijakan Privat

Kebijakan publik dapat juga dimasukkan dalam ketentuan yang merupakan barang kolektif (*indivisible*) atau barang privat (*divisible*). Yang disebut sebagai barang kolektif adalah kebijakan tentang penyediaan barang dan pelayanan bagi keperluan orang banyak (kolektif). Kebijakan privat adalah kebijakan yang dapat dibagi menjadi satuan-satuan dan dibiayai untuk pemakai tunggal dan dapat dipasarkan, contohnya adalah pelayanan pos, perawatan kesehatan, museum, taman nasional, dan masih banyak lagi.

2.3 Pengertian Program

Konsep Program dalam skripsi ini digunakan untuk menjelaskan definisi program yang dimaksud oleh peneliti serta untuk menjelaskan keterkaitannya dengan kebijakan publik. Program merupakan rangkaian atau kelanjutan dari sebuah kebijakan publik penjabar. Program dilaksanakan guna merealisasikan dari kebijakan-kebijakan yang telah pemerintah buat.



Gambar 5.2 Kebijakan Publik
(Sumber: Riant Nugroho 2008:433)

Pada gambar di atas bisa dijelaskan bahwa kebijakan publik masih dalam bentuk UU/ Perda, yang nantinya akan lebih diperjelas dalam kebijakan publik penjelas atau yang sering disebut dengan peraturan pelaksanaan. Rangkaian bentuk implementasi kebijakan dapat dilihat secara jelas dari kebijakan publik penjelas yang diturunkan dalam bentuk program serta diturunkan lagi ke dalam bentuk proyek dan kegiatan yang nantinya akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Karding (2008:21) program adalah unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Sedangkan menurut Wahab (2008:177) program dapat diartikan sebagai kebijakan-kebijakan publik yang pada umumnya masih abstrak berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran dan berbagai macam sarana (sebagaimana dapat kita lihat dalam Garis Besar Haluan Negara) – diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih operasional yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ataupun saransasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Maka dapat dipahami bahwa adanya program adalah kepanjangan/ turunan dari suatu kebijakan yang memiliki tujuan-tujuan yang kurang lebih sama. Program menjadi

penerus atau penunjang bagi kebijakan agar dapat tersampaikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan khususnya dan untuk masyarakat luas.

Program PUAP merupakan perwujudan dari kebijakan distributif berupa pemberian bantuan kepada Gapoktan sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan pedesaan melalui peningkatan kapasitas Gapoktan yang diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan mikro sebagai sumber permodalan petani.

2.4 Pembedayaan Masyarakat

Teori pemberdayaan masyarakat dalam skripsi ini digunakan untuk menjelaskan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Konsep pemberdayaan masyarakat dalam skripsi ini akan menjelaskan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari dua aspek, yakni aspek manusia dan aspek usaha sebagaimana yang dijelaskan oleh Sumadyo (2011).

2.4.1 Definisi

Konsep pemberdayaan dapat dikatakan sebagai jawaban atas realitas ketidakberdayaan (*disempowerment*). Mereka yang tidak berdaya adalah pihak yang tidak memiliki daya atau kehilangan daya. Mereka yang tidak berdaya adalah mereka yang kehilangan kekuatannya. Definisi pemberdayaan dalam arti sempit, yang berkaitan dengan sistem pengajaran antara lain dikemukakan oleh Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata "*empower*" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan (Asnida, 2014)

Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya,

tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdikan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). (Mardikanto dan Soebiato, 2015:43-44)

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. (Mardikanto dan Soebiato, 2015:53)

2.4.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Mathes menyatakan bahwa “prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. (Mardikanto dan Soebiato, 2015:105)

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:105) pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Mengerjakan*, artinya, kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama;
2. *Akibat*, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; karena, perasaan senang/puas atau tidak-senang/ kecewa akan memengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan dimasa-masa mendatang;
3. *Asosiasi*, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan/ menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/ peristiwa yang lainnya. Misalnya dengan melihat cangkul orang diingatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik; melihat tanaman yang kerdil/subur, akan mengingatkannya kepada usaha-usaha pemupukan, dll.

Berkaitan dengan pembangunan pertanian dan peningkatan produktivitas usahatani ke arah pengembangan agribisnis, Soedijanto (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2015:108) mengemukakan beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat:

- 1) *Kesukarelaan*, artinya, keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan,

melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya;

- 2) *Otonom*, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain;
- 3) *Keswadayaan*, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar;
- 4) *Partisipatif*, yaitu keterlibatan semua *stakeholders* sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya;
- 5) *Egaliter*, yang menempatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan;
- 6) *Demokrasi*, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama *stakeholders*
- 7) *Keterbukaan*, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan;
- 8) *Keberamaan*, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme;
- 9) *Akuntabilitas*, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun;
- 10) *Desentralisasi*, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya pertanian bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan

2.4.3 Tujuan Pemberdayaan

Mardikanto dan Soebiato (2015:111) mengemukakan terdapat delapan tujuan dalam pemberdayaan meliputi;

- 1) Perbaiki pendidikan (*better education*)

Dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada; perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup;

2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*).

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran;

3) Perbaikan tindakan (*better action*).

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik;

4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha;

5) Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat pendidikan), perbaikan aksesibilitat kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan;

6) Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya;

7) Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas;

8) Perbaiki kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat;

9) Perbaiki masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.4.4 Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*). Karena itu, kegiatan pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (*poverty reduction*). Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan peningkatan pendapatan (*income generating*).

Tentang hal ini, Sumadyo (2001) merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina lingkungan.

1. Bina Manusia

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:223) tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan (kemampuan dan perbaikan posisi-tawar) masyarakat. dalam upaya pemberdayaan masyarakat difokuskan pada dua hal, yakni peningkatkan kemampuan masyarakat dan peningkatan posisi tawar menawar.

a) Peningkatan kemampuan masyarakat

Dalam konsep pendidikan, yang dimaksud kemampuan setiap individu mencakup ranah: pengetahuan (*kognitif*), sikap (*afektif*), dan keterampilan (*psikomotorik*). Tentang ketiga ranah tersebut, kritik yang sering disampaikan kepada dunia pendidikan kita adalah terlalu terpusat pada IQ (*intelligence quotient/kecerdasan otak*) dan kurang muatan EQ (*Emotional quotient/kecerdasan emosional*) maupaunSQ (*Spiritual quotient/kecerdasan spiritual*). Terkait dengan

masalah tersebut, maka peningkatan kemampuan masyarakat yang akan diupayakan melalui pemberdayaan adalah diutamakan kepada: sikap-sikap kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian. Yang dimaksud dengan sikap kewirausahaan adalah sikap inovatif, mengacu pada kebutuhan (masyarakat) pasar, serta optimasi sumberdaya lokal. Dengan perkataan lain, kemampuan kewirausahaan diarahkan untuk menggali keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki dan atau tersedia dilokalitasnya untuk diubah menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*).

Sikap profesional, diartikan sebagai terus menerus mengembangkan keahlian sesuai kompetensinya, bangga dan mencintai profesinya, serta memegang teguh etika profesinya. Dalam pengertian ini, loyalitas terhadap profesi lebih menjadi penting dibanding sekedar loyalitasnya kepada institusi tempatnya bekerja.

Sedangkan kemandirian bukan diartikan sebagai berdikari (memenuhi kebutuhannya sendiri), melainkan kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya. Artinya, dalam kemandirian tidak menolak bantuan dari “pihak luar”, tetapi kemandirian dalam art berani menolak bantuan yang akan merugikan dan atau akan menciptakan ketergantungan.

Meskipun demikian, peningkatan kemampuan masyarakat harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu produk, meningkatkan efisiensi dan daya saing produk yang dihasilkan. Dalam hubungan ini, seiring dengan perkembangan IPTEKS, penguasaan teknologi informasi (*information and communication technology/ICT*) mutlak harus menjadi perhatiannya.

b) Peningkatan posisi-tawar masyarakat

Terkait dengan peningkatan posisi-tawar, pengorganisasian masyarakat (*community organizing*) akan memainkan peran strategis. Tidak saja untuk menyusun kekuatan bersama (*collective capacity*), tetapi juga dalam membangun jejaring (*networking*) antar pemangku kepentingan yang terdiri dari: birokrasi, akademisi, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, dan pelaku/ pengelola media,

utamanya dalam kegiatan advokasi dan politisasi. Sejalan dengan itu, pendidikan politik dan keterlibatan dalam gerakan politik praktis harus menjadi agenda pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan posisi-tawar tersebut, harus dipahami bahwa peningkatan daya saing yang terbaik adalah membangun sinergi, dengan mengupayakan agar pesaing-potensial dapat dijadikan mitra strategis. Dengan perkataan lain, pendekatan konflik harus diupayakan untuk diubah menjadi manajemen kolaboratif

2. Bina Usaha

Bina Usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab, Bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi) tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan, Sebaliknya, hanya Bina Manusia yang mampu (dalam waktu dekat/cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi) yan akan laku atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Tentang hal ini, Bina Usaha mencakup:

1. Pemilihan komoditas dan jenis usaha;
2. Studi kelayakan dan perencanaan bisnis;
3. Pembentukan Badan usaha;
4. Perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan;
5. Pengelolaan SDM dan pengembangan karir;
6. Manajemen produksi dan operasi;
7. Manajemen logistik dan finansial;
8. Penelitian dan pengembangan;
9. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Bisnis;
10. Pengembangan jejaring dan kemitraan;
11. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung

3. Bina Lingkungan

Berkaitan dengan Bina lingkungan, adalah upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan (areal kerja),

maupun yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penanaman modal/ perseorangan. Sedang yang termasuk tanggungjawab lingkungan, adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/ reklamasi) sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dalam hal ini, penulis memfokuskan penelitian pada lingkup Bina Manusia dan Bina Usaha, lingkup Bina Lingkungan tidak penulis pilih karena keterbatasan pengetahuan dan indikator yang susah ditentukan,

2.5 Evaluasi Kebijakan

2.5.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan (Suharyadi, 2007). Salah satu kriteria yang digunakan pada penilaian dalam evaluasi adalah hasil (*outcomes*) yaitu apakah terjadi perubahan indikator-indikator utama tujuan program (membaik atau tidak), berapa banyak perubahannya, serta apakah perubahan tersebut disebabkan oleh program. Evaluasi dampak dilakukan untuk mengkaji apakah suatu program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, masyarakat, dan kelembagaan.

2.5.2 Tujuan Evaluasi

Dalam mengevaluasi kebijakan, ada fokus yang ingin dicapai oleh pengevaluasi. Evaluasi kebijakan memiliki tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut (Subarsono, 2005:120-121) :

- a. menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan
- b. mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan

- c. mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan
- d. mengukur dampak suatu kebijakan Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif
- e. untuk mengetahui apabila ada penyimpangan evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target
- f. sebagai bahan melakukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

2.5.3 Tipe Evaluasi

Evaluasi kebijakan terdiri dari tiga tipe yaitu sebagai berikut.

a. *Pre-program evaluation*

Pre program evaluation dijalankan sebelum program diimplementasikan. Biasanya untuk mengukur tingkat kebutuhan dan potensi pengembangan dari target atau daerah tujuan, mengetest hipotesis program atau menentukan kemungkinan keberhasilan dari rencana program atau proyek

b. *On-going evaluation.*

On-going evaluation didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai “sebuah analisa, yang berorientasi pada aksi, tentang efek dan akibat dari proyek dibandingkan dengan antisipasi yang diambil selama pengimplementasian”

c. *Ex-post evaluation.*

Ex-post evaluation sebagai proses yang diambil setelah pengimplementasian program, memeriksa efek dan akibat dari program, dan juga ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang;

1. Keefektifan program dalam meraih tujuan-tujuan yang telah ditetapkan;
2. Kontribusi terhadap target-target perencanaan dan pengembangan sektoral ataupun nasional;

3. Akibat jangka panjang sebagai hasil dari kebijakan.

2.5.3 Langkah-langkah Evaluasi

Agar suatu kebijakan dapat dievaluasi dengan baik, para ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Edward Suchman dalam Winarno (2004:169) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standardisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Menurut Suchman dalam Winarno (2004:169), mendefinisikan masalah merupakan tahap yang paling penting dalam evaluasi kebijakan. Setelah masalah didefinisikan dengan jelas maka tujuan-tujuan dapat disusun dengan jelas pula. Oleh karena itu, ia juga mengidentifikasi beberapa pertanyaan operasional untuk menjalankan riset evaluasi seperti: (1) Apakah yang menjadi isi dari tujuan program? (2) Siapa yang menjadi target program? (3) Kapan perubahan yang diharapkan terjadi? (4) Apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak (*unitary or multiple*)? (5) Apakah dampak yang diharapkan besar? (6) Bagaimanakah tujuan-tujuan tersebut dicapai?

2.5.4 Pendekatan Evaluasi

Menurut Dunn (2003:611-612), evaluasi kebijakan mempunyai dua aspek yang saling berhubungan: penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program dan aplikasi serangkaian nilai untuk kegunaan hasil terhadap beberapa orang, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Dunn membedakan tiga jenis pendekatan dalam evaluasi antara lain:

1. Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi

yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utamanya adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri atau tidak kontroversial.

2. Evaluasi formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode dekriptif untuk menghasikan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utamanya bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.
3. Evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode dekriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok evaluasi ini dengan dua jenis pendekatan di atas adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan.

2.5.5 Metode Evaluasi

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Subarsono (2005:128), untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan, ada beberapa metode evaluasi yang dapat dipilih yakni:

- a. *Single program after – only* yaitu informasi diperoleh berdasarkan keadaan kelompok sasaran sesudah program dijalankan
- b. *Single program before – after* yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan perubahan keadaan sasaran sebelum dan sesudah program dijalankan
- c. *Comparative after – only* yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan keadaan sasaran dan bukan sasaran program dijalankan

- d. *Comparative before – after* yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan efek program terhadap kelompok sasaran sebelum dan sesudah program dijalankan.

Tabel 3.1 Metodologi untuk Evaluasi Program

| Jenis Evaluasi | Pengukuran kondisi kelompok sasaran | | Kelompok kontrol | Informasi yang diperoleh |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|---|
| | Sebelum | Sesudah | | |
| <i>Single Program After Only</i> – | Tidak | Ya | Tidak ada | Keadaan kelompok sasaran |
| <i>Single Program Before After</i> – | Ya | Ya | Tidak ada | Perubahan kelompok sasaran |
| <i>Comparative After Only</i> | Tidak | Ya | Ada | Keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol |
| <i>Comparative Before After</i> – | Ya | Ya | Ada | Efek program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol |

Sumber: Subarsono (2005:130)

2.6 Dampak Kebijakan

Dampak adalah perbedaan antara indikator hasil dengan program dan indikator hasil tanpa program. Tetapi, sulit untuk melihat seseorang atau sesuatu dalam keadaan yang berbeda pada saat yang bersamaan. Jadi, meskipun indikator hasil setelah program dapat diamati, indikator hasil tanpa program, yang biasa disebut sebagai kontra-fakta (*counter-factual*), tidak dapat diamati (Suharyadi, 2007).

Menurut Agustino (2012:192), kebijakan dapat mempunyai akibat yang diharapkan atau yang tidak diharapkan, atau bahkan keduanya. Lebih lanjut, menurut Winarno (2010:236) bahwa suatu program kebijakan yang dijalankan pada dasarnya mempunyai peluang untuk menimbulkan konsekuensi-konsekuensi

tertentu, baik yang diinginkan maupun tidak. Artinya, sebuah program yang dijalankan dan menyentuh masyarakat, memiliki dampak positif dan negatif.

Policy outcome atau akibat dari kebijakan adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang di kerjakan atau yang tidak di kerjakan pemerintah (Agustino, 2012:10). Dalam hal ini, dampak merupakan ranah atau bagian dari evaluasi itu sendiri. Suatu kebijakan publik tentunya memiliki masyarakat sasaran dalam memecahkan suatu masalah. Dengan adanya masalah tersebut maka pemerintah mengeluarkan program dalam memecahkan masalah tersebut. Ketika suatu *target group* menerima program tersebut, diharapkan dengan pemecahan tersebut masalah dapat teratasi, hal ini menurut penulis ranah evaluasi dalam arti capaian. Setelah tujuan tercapai atau tidak tercapai tentunya ada perilaku masyarakat yang berubah dari program tersebut. Karena dari masyarakat tidak di beri pengaruh kemudian di beri pengaruh maka akan timbul suatu perubahan (dampak).

Menurut Islamy (2004), dampak merupakan akibat-akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut. Dalam hal ini, pengertian tersebut melihat dampak sebagai apa yang telah di harapkan oleh program tersebut. Sedangkan menurut Wibawa (1994:5), dampak yaitu suatu perubahan kondisi fisik dan sebagai akibat dari output kebijakan. Pengertian tersebut lebih mengarah pada hal-hal yang tidak terduga yaitu berkenaan dengan faktor-faktor dan perilaku yang tidak dapat di prediksi oleh program tersebut

2.7 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang selanjutnya disingkat PUAP adalah bantuan modal usaha Gabungan Kelompok tani dalam menumbuh kembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. PUAP merupakan bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri yang melakukan penyaluran bantuan modal usaha dalam upaya menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran, yang diwujudkan dengan penerapan pola bentuk fasilitas bantuan penguatan modal usaha untuk petani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. PUAP

merupakan salah satu subsidi dari pemerintah untuk rumah tangga petani miskin berupa bantuan modal usaha baik dalam bentuk barang sarana produksi pertanian maupun dalam bentuk modal keuangan.

Operasional penyaluran dana PUAP dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gapoktan melalui PUAP dalam hal penyaluran dana penguatan modal kepada anggota. Agar mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Jumlah dana yang disalurkan ke setiap Gapoktan maksimal sebesar Rp. 100 juta. Dana tersebut disalurkan ke setiap anggota Gapoktan untuk menunjang kegiatan usaha taninya. Dengan demikian, Gapoktan diharapkan mampu menjadi lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Gapoktan sebagai penyalur PUAP antara lain : memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha agribisnis, struktur kepengurusan yang aktif, dimiliki dan dikelola oleh petani, dan dikukuhkan oleh bupati atau walikota (Kementan, 2015).

Tujuan utama dari program PUAP adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.
2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan, penyuluh pertanian, dan penyelia mitra tani.
3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk mengembangkan kegiatan agribisnis.
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan jejaring atau mitra kelembagaan keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Adapun sasaran yang diharapkan dari program PUAP adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya usaha agribisnis di desa miskin terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa;
2. Berkembangnya gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk

menjadi kelembagaan ekonomi;

3. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/ peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
4. Berkembangnya usaha agribisnis yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman.

Program PUAP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2008, pelaksanaannya melalui pendekatan dan strategi sebagai berikut : (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP; (2) Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin yang terjangkau; (3) Fasilitasi modal usaha bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin; 4) Penguatan kelembagaan gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dikelola dan dimiliki petani.

Indikator keberhasilan output antara lain:

1. Tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota gapoktan sebagai modal usaha untuk melakukan usaha produktif pertanian; dan
2. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola gapoktan, penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani.

Indikator keberhasilan outcome antara lain:

1. Meningkatnya kemampuan gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani;
2. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha;
3. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan; dan
4. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah;

Sedangkan indikator benefit dan Impact antara lain:

1. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP.

2. Berfungsinya gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani; dan
3. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.

Pelaksanaan PUAP dilakukan melalui pendekatan dan strategi sebagai berikut : (1) Memberikan bantuan modal usaha kepada petani untuk membiayai usaha agribisnis dengan membuat usulan dalam bentuk RUA, RUK dan RUB; (2) Petani penerima manfaat program PUAP tersebut harus mengembalikan dana modal kepada Gapoktan sehingga dapat digulirkan lebih lanjut oleh Gapoktan melalui usaha simpan-pinjam (tahun ke dua); (3) Dana modal usaha yang sudah digulirkan melalui pola simpan-pinjam selanjutnya melalui keputusan seluruh anggota gapoktan diharapkan dapat ditumbuhkan menjadi LKM-A, dan pada akhirnya difasilitasi menjadi jejaring pembiayaan (Linkages) dari perbankan/lembaga keuangan (Juknis Pernerangan (Rating) Gapoktan PUAP Menuju LKM-A, 2010).

2.8 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan organisasi petani diperdesaan yang dibentuk secara musyawarah dan mufakat untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan dibentuk atas dasar: (1) kepentingan yang sama diantara para anggotanya; (2) berada pada kawasan usahatani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya; (3) Mempunyai kader pengelola yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani; (4) memiliki kader atau pemimpin diterima oleh petani lainnya; (5) Mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya, dan (6) adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat. (Kementan,2010)

Untuk membangun Gapoktan yang ideal sesuai dengan tuntutan organisasi masa depan, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Proses penumbuhan dan pengembangan gapoktan yang kuat dan mandiri diharapkan secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan petani dalam pembiayaan, dan pemasaran. Berdasarkan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman pembinaan kelembagaan petani, pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat perdesaan. Dalam rangka mengukur kapasitas dan aspek tata kelola organisasi menggunakan ukuran sebagai berikut:

1. Aturan yang dimiliki.

Sejalan dengan strategi pembinaan Gapoktan PUAP untuk ditumbuhkan menjadi LKM-A, maka diperlukan aturan tertulis yang disepakati dan mengikat seluruh anggota dengan Gapoktan sebagai organisasi. Aturan yang harus dimiliki oleh gapoktan adalah Anggaran Dasar (AD) yang merupakan aturan dasar dari sebuah lembaga gapoktan yang disusun oleh petani pemilik gapoktan dalam menentukan arah dan kebijakan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan penjabaran dari anggaran dasar yang memuat aspek: hak dan kewajiban anggota, pengurus dan pengelola; kegiatan usaha, modal dan simpanan anggota, pembinaan dan pengawasan dan lain-lain.

2. Pengelola LKM-A

Pengelola dan pengurus dalam suatu organisasi lembaga keuangan yang sehat sebaiknya terpisah. Secara umum pengurus mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan organisasi, pengawasan, melaporkan perkembangan dan kemajuan organisasi kepada anggota atau pemegang saham. vPengelola merupakan organik pelaksana operasional bisnis keuangan organisasi LKM-A sesuai dengan AD/ART. Pengelola LKMA antara lain terdiri dari Manajer, Pembiayaan, Administrasi Pembukuan, Teller dan penggalangan dana.

3. Rencana Kerja.

Rencana kerja organisasi merupakan rencana bisnis yang telah diputuskan melalui rapat anggota. Pembentukan rencana kerja yang ideal pada umumnya dilaksanakan secara partisipatif. Rencana kerja gapoktan ditetapkan oleh pengurus melalui rapat anggota dan menjadi dasar pengelola dalam pengembangan usaha dan bisnis gapoktan.

4. Rapat anggota secara berkala

Pertemuan atau rapat anggota yang dilaksanakan secara berkala dan terjadwal merupakan hal dasar yang dapat mengukur kedinamisan pengelolaan Gapoktan sebagai organisasi ekonomi. Tradisi melaksanakan rapat-rapat internal Gapoktan secara teratur menunjukkan kinerja pengelolaan organisasi yang baik sehingga dapat dipastikan seluruh anggota mengetahui kebijakan dan program gapoktan serta langkah-langkah organisasi yang bertujuan untuk memecahkan persoalan anggota.

5. Penyelenggaraan Rapat Anggota (RAT)

Sebagai organisasi yang mempunyai basis dasar hukum koperasi maka penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Gapoktan PUAP adalah menjadi ukuran keberhasilan pengelola dalam mengorganisasikan LKM-A sebagai lembaga ekonomi. Jadwal waktu pelaksanaan RAT juga menjadi ukuran keberhasilan pengelola untuk mencapai tujuan organisasi.

6. Badan Hukum

Sebagai lembaga keuangan mikro yang mengelola dana petani dan masyarakat, Badan hukum merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki. Gapoktan yang diproyeksikan menjadi LKM-A disarankan menggunakan dasar hukum Undang Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 dan dalam operasionalnya menggunakan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Disamping menggunakan badan hukum koperasi, gapoktan juga dapat menggunakan badan hukum melalui peraturan daerah (perda) walaupun secara teknis belum/tidak dapat dipakai sebagai dasar program *linkage* dengan perbankan/lembaga keuangan. (Kementan, 2010).

BAB 3. METODE PENELITIAN

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:50) metode penelitian merupakan pendekatan yang dilakukan, konsep-konsep dasar yang hendak digunakan, populasi dan sampel, metode penentuan sampel, metode pengambilan data, rumus statistik yang hendak digunakan dalam menganalisis data. Berdasarkan definisi mengenai metode dan metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara yang dapat ditempuh oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dengan langkah-langkah sistematis.

Metode penelitian untuk penelitian kuantitatif dan penelitian eksperimental menguraikan komponen-komponen yang terdiri atas (a) rancangan penelitian, (b) populasi dan sampel, (c) jenis dan sumber data, (d) definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, (e) metode analisis data dan pengujian hipotesis, dan (f) kerangka pemecahan masalah. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing komponen (Universitas Jember, 2016).

- A. Rancangan Penelitian Subbagian ini menjelaskan rancangan atau desain riset yang akan digunakan untuk menyusun tugas akhir. Pada dasarnya, rancangan atau desain riset dapat berupa rancangan penelitian studi kasus, deskriptif, survei, atau eksperimen.
- B. Populasi dan Sampel Subbagian ini menjelaskan populasi dan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Pada penelitian studi kasus dan eksperimental, subbagian ini tidak diperlukan.
- C. Jenis dan Sumber Data Subbagian ini menjelaskan jenis data penelitian yang akan digunakan dan sumbernya. Jenis data dapat meliputi item data yang akan digunakan.
- D. Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya Subbagian ini menjelaskan definisi tentang variabel penelitian dan skala pengukurannya. Definisi operasional variabel menyangkut definisi yang akan digunakan secara operasional dalam penelitian. Skala pengukuran variabel meliputi skala nominal, ordinal, interval, dan rasio.

- E. Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Subbagian ini memaparkan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. Metode analisis data mengacu dan terkait dengan tujuan penelitian. Jika penelitian yang diusulkan mempunyai hipotesis penelitian, prosedur pengujian hipotesis harus dijelaskan dalam subbagian ini.
- F. Kerangka Pemecahan Masalah. Subbagian ini menjelaskan alur atau urutan kerja yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Alur atau urutan kerja dapat disajikan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*).

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008:7) “Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postivistik, digunakan untuk mneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada paradigma kuantitatif dan tipe penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:35), penelitian deskriptif adalah penelitain yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan dampak pemberdayaan petani melalui program PUAP di Gapoktan Usaha Jaya dilihat dari aspek manusia dan usaha berdasarkan konsep upaya pokok Pemberdayaan Masyarakat menurut Sumadyo.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Bungin (2006:99) Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala,nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2009:90),Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi penelitian adalah semua petani yang berada di Desa Sidomulyo, sebab pada hakikatnya semua petani merupakan anggota Gapoktan yang terdiri atas tiga kelompok tani yakni Sidomulyo I, Sidomulyo V, dan Curah manis. Petani yang tergabung di masing-masing kelompok tani terbagi kedalam dua status, yakni aktif dan tidak aktif. Keanggotaan aktif yakni petani yang sering terlibat dan mengikuti kegiatan di masing-masing Kelompok Tani, sementara keanggotaan tidak aktif yakni petani yang berada di Desa Sidomulyo namun tidak terlibat dalam kegiatan Kelompok tani.

3.2.2 Sampel

Pengambilan sampel dimaksudkan untuk mewakili seluruh populasi (Bungin, 2008:101). Menurut Idrus (2009:93) pada dasarnya penggunaan sampel penelitian diperkenankan dalam prosedur penelitian selama sampel tersebut dapat mewakili populasinya secara baik (*representatif*) serta menggunakan teknik pengambilan sampel (teknik *sampling*) yang benar. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2005:91) yang menyatakan, “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Mengenai hal ini, Arikunto (2010:183) menjelaskan bahwa “*purposive sampling*” dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.” Begitu pula menurut Sugiyono (2010:85) *sampling purposive* adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang. Nilai tersebut diperoleh didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua anggota yang tergabung dalam Gapoktan merupakan anggota yang aktif. Selain itu pertimbangan nilai tersebut didasarkan pula pada saran dari beberapa pengurus

dengan alasan hanya sebagian kecil anggota Gapoktan yang mengetahui tentang program PUAP.

3.3 Jenis dan Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24)

“Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik benda maupun orang. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen dan atau sumber informasi lainnya”.

Menurut Umar (2004:64), jenis sumber data yaitu:

1. Pengumpulan data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama di lokasi penelitian. Data ini merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengumpulan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut (data olahan) yang fungsinya memperkuat data primer.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dan mengamati keadaan yang terjadi di tempat penelitian. Sugiyono (2009:156) mengatakan bahwa, “pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.” Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Metode Kuesioner

Pada umumnya kuesioner meminta keterangan tentang fakta yang diketahui oleh responden atau juga mengenai pendapat atau sikap. Menurut Bungin (2008:123), “kuesioner adalah serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden.”

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survai. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh

dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu merupakan tulang punggung suatu penelitian (Singarimbun, 1995:192). Dalam wawancara juga terdapat pedoman wawancara, adapun pengertiannya menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2007:35), pedoman wawancara (*interview guide*) adalah daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang dimaksudkan untuk menggali data/ informasi secara lengkap dan mendalam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknik wawancara adalah cara memperoleh data dengan kegiatan tanya jawab kepada responden. Hasil dari wawancara tersebut merupakan keterangan atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.

3. Dokumen

Dokumen Menurut Bungin (2008:144) dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mempelajari hal-hal yang telah silam.

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional ialah spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur atau memanipulasi suatu variabel. Definisi operasional memberi batasan atau arti suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut (Idrus, 2009:18). Jadi, dengan adanya definisi operasional peneliti akan mendapatkan sebuah petunjuk dalam pengukuran variabel.

3.4.1 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sumadyo (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2015:113) Setidaknya ada tiga upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat yang disebutnya dengan Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Masing masing indikator dalam setiap aspek telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Untuk memudahkan penelitian, penulis perlu melakukan definsi operasional variabel agar pertanyaan yang diberikan kepada responden dapat dipahami namun tidak keluar dari konteks masing-masing variabel, dalam penelitian ini peneliti hanya

mengambil aspek bina manusia dan bina usaha, alasan penulis tidak memilih aspek bina lingkungan dikarenakan keterbatasan penulis dalam memahami dan menentukan indikator dalam aspek tersebut. Adapun masing-masing definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bina Manusia

Berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan dan posisi tawar masyarakat, terdapat empat indikator dalam upaya bina manusia, yakni Sikap Kewirausahaan, sikap profesional, sikap mandiri, dan peningkatan posisi tawar masyarakat

1) Sikap Kewirausahaan

Kemampuan menggali sumberdaya lokal untuk dijadikan sebagai komoditas unggulan. Indikator ini dibagi kedalam item-item berikut.

- a. Kemampuan untuk mengetahui potensi desa
- b. Kemampuan untuk mengambil resiko usaha
- c. Kemampuan dalam melakukan perbaikan terhadap usaha

2) Sikap Profesional

Kemampuan dalam mengembangkan keahlian sesuai kompetensinya secara berkelanjutan, bangga dan mencintai profesinya, serta memegang teguh etika profesinya. Indikator ini dibagi kedalam item-item berikut.

- a. Menganggap petani sebagai profesi yang penting
- b. Menganggap petani sebagai profesi yang membanggakan
- c. Menyadari bahwa seseorang perlu mengembangkan keahliannya
- d. Mengikuti etika petani yang berlaku
- e. Mengikuti kegiatan pertanian yang diselenggarakan oleh institusi lain

3) Sikap Kemandirian

kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya. . Indikator ini dibagi kedalam item-item berikut.

- a. Menentukan jenis usaha secara mandiri
- b. Menentukan pupuk yang digunakan secara mandiri

- c. Menentukan jumlah dana yang akan dipinjam secara mandiri
- d. Berusaha untuk tidak bergantung kepada pinjaman dari luar

4) Peningkatan posisi tawar masyarakat

kemampuan dalam membangun jejaring (networking) antar pemangku kepentingan yang terdiri dari: birokrasi, akademisi, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, dan pelaku/ pengelola media, utamanya dalam kegiatan advokasi dan politisasi. . Indikator ini dibagi kedalam item-item berikut.

- a. Menganggap butuh bekerjasama dengan institusi lain
- b. Menjalin kerjasama dengan lembaga/institusi perbankan
- c. Menjalin kerjasama dengan lembaga/institusi pendidikan
- d. Menalin kerjasama dengan perusahaan
- e. Mengundang pejabat pemerintah untuk memberikan penyuluhan
- f. Mendapatkan modal dengan nominal lebih besar

2. Bina Usaha

Berkaitan dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam manajemen usaha dan organisasi

a. Pemilihan komoditas dan jenis usaha

petani melakukan analisa terkait dengan komoditas usaha yang akan dijalankan, dalam pemilihan komoditas usaha, petani mempertimbangkan faktor cuaca, kondisi pasar, kondisi lahan, dan dampak yang akan ditimbulkan.

b. Studi kelayakan dan perencanaan bisnis

Petani melakukan analisa keuntungan dan resiko dalam menentukan usaha yang akan dilakukan

c. Perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan

Pengurus melakukan rapat bersama dengan anggota terkait dengan rencana penggunaan dana untuk ditabung agar mendapat keuntungan dimasa yang akan datang serta melakukan penetapan anggaran untuk proses produksi

d. Manajemen produksi dan operasi

Petani melakukan penyusunan program, baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, baik jangka pendek maupun jangka panjang. manajemen produksi pertanian mencakup kegiatan perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian.

e. Manajemen Logistik dan Finansial

Petani melakukan pengelolaan dan pendistribusian hasil pertanian, serta melakukan pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh Gapoktan

f. Penelitian dan pengembangan

Petani melakukan penelitian dan pengembangan. Bentuk penelitian dilakukan dengan melakukan kemitraan antara Gapoktan dengan Lembaga Penelitian

3.4.2 Pengukuran Variabel

Teknik pengukuran data yang diperoleh dari hasil kuisioner akan diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang maupun kelompok tentang fenomena sosial. Dengan skala likert variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut diisikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Untuk menentukan skor penelitian, pengukuran ditentukan dari masing-masing variabel dengan menggunakan skala likert dan kriteria pengukurannya adalah sebagai berikut:

- a. Sangat Setuju (SS) : diberi skor 5
- b. Setuju (S) : diberi skor 4
- c. Ragu-ragu (RG) : diberi skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) : diberi skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi skor 1

3.5 Metode Analisis data

3.5.1 Uji Validitas

Dalam penelitian, menjadi sangat penting adanya instrumen yang valid dan reliabel. Singarimbun dan Effendi (1989:122) mengatakan validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Bila seseorang ingin mengukur berat suatu benda, maka dia harus menggunakan timbangan. Timbangan adalah alat pengukur yang valid bila dipakai untuk mengukur berat, karena timbangan memang mengukur berat. Bila panjang sesuatu benda yang ingin diukur, maka dia harus menggunakan meteran. Meteran adalah alat pengukur yang valid bila digunakan untuk mengukur panjang, karena memang meteran mengukur panjang. Tetapi timbangan bukanlah alat pengukur yang valid bilamana digunakan untuk mengukur panjang.

Uji Validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS Versi 18 yaitu dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan skor *contract*. *Contract* dikatakan valid jika nilai *Pearson Correlation* $> r$ *product moment* dan signifikan $< 0,05$.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang diinginkan dapat dipercaya (diandalkan) sebagai alat pengumpul data serta mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten. Teknik dalam menguji reliabilitas ini adalah Cronbach Alpha. Kriteria pengujiannya adalah jika koefisien alpha (α) $> r$ *product moment* maka instrumen yang digunakan dikatakan *reliable*.

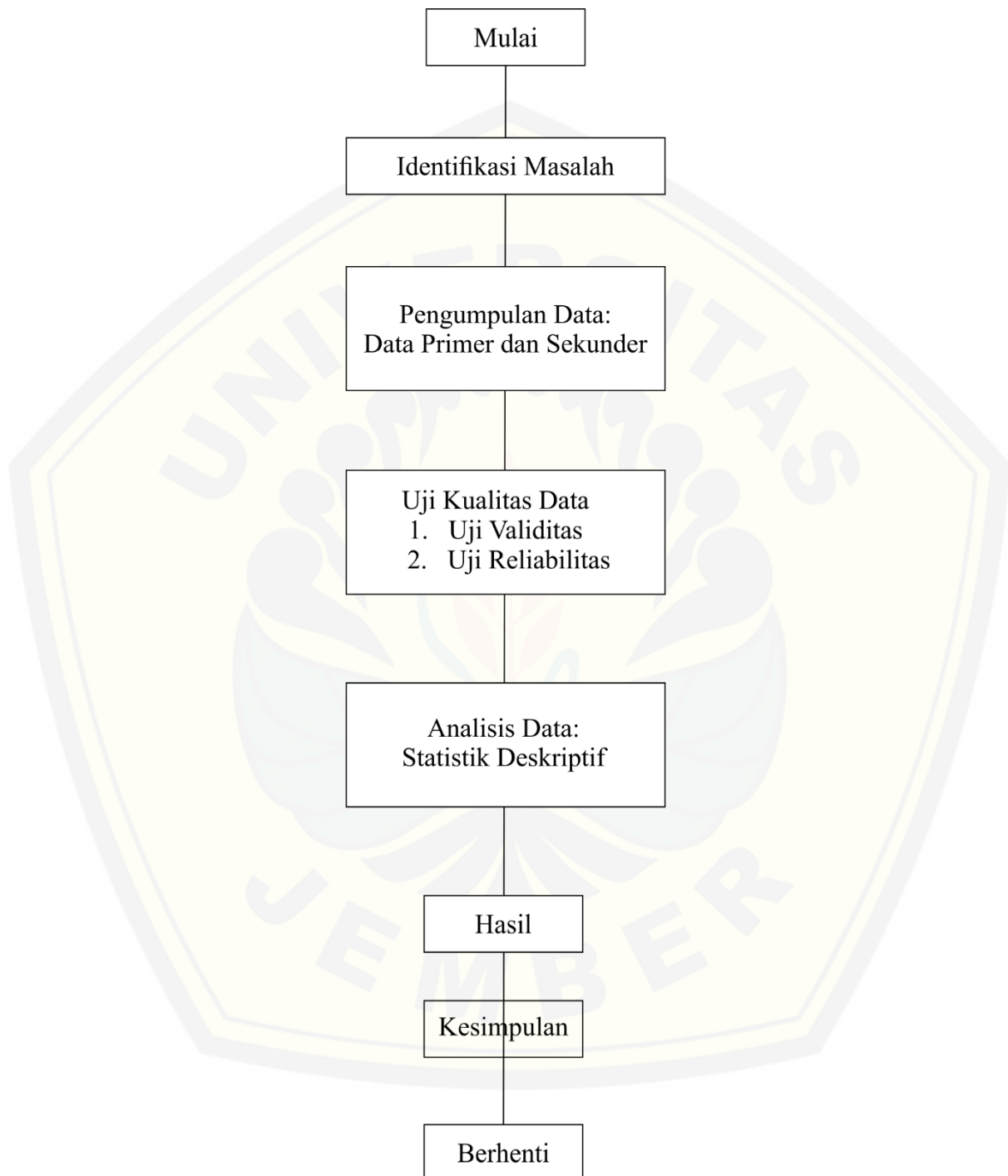
3.5.3 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2009: 169) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Lebih lanjut Sugiyono (2009: 170) menyatakan bahwa, penyajian data yang termasuk dalam statistik deskriptif adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta perhitungan prosentasi. Dalam statistik deskriptif, tidak terdapat uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut maka penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu, menggunakan tabel dan grafik. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini, peneliti bermaksud mendeskripsikan hasil evaluasi pemberdayaan petani melalui proram PUAP.

3.5.4 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 6.1 Flowchart Penelitian

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan hasil penelitian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan program PUAP di Gapoktan Usaha Jaya secara pengelolaan keuangan dapat dikatakan berhasil, karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2008 sebesar 100 juta rupiah, dapat dikembangkan menjadi 800 juta rupiah lebih di pada tahun 2014.
2. Pelaksanaan program PUAP berdampak pada peningkatan keberdayaan masyarakat yang meliputi aspek bina manusia yakni sikap kewirausahaan, sikap profesionalisme, sikap kemandirian, posisi tawar masyarakat dan juga aspek usaha.
3. Dampak Program PUAP terhadap sikap kewirausahaan menunjukkan sebagian besar petani mengetahui tentang potensi desa setelah program PUAP dilaksanakan dengan menjadikan kopi “ketakasi” sebagai komoditas unggulan di daerah penelitian. Hasil penelitian dalam sikap kewirausahaan juga menunjukkan pelaksanaan program PUAP berdampak kepada keberanian petani dalam mengambil resiko usaha yang akan dijalani.
4. Dampak Program PUAP terhadap sikap profesionalisme menunjukkan hampir semua petani mengaku bangga terhadap profesinya, serta berupaya menjaga etika profesi dengan menjual hasil panen berdasarkan dengan aturan yang telah disepakati
5. Dampak Program PUAP terhadap sikap kemandirian menunjukkan sebagian besar petani telah mampu menentukan sendiri jenis komoditas, pupuk, dan jumlah dana yang akan dipinjam melalui lembaga keuangan baik koperasi maupun bank. Hasil penelitian juga menunjukkan sebagian besar petani berupaya untuk tidak meminjam bantuan keuangan dari pemerintah

6. Dampak Program PUAP terhadap posisi tawar menawar menunjukkan selama pendampingan program PUAP, Gapoktan telah menjalin kerjasama dengan instansi pendidikan, perbankan dan juga perusahaan.
7. Dampak Program PUAP terhadap Bina Usaha menunjukkan sebagian besar responden telah melakukan investasi dari hasil panen yang diperoleh, salah satunya dengan membeli tanah untuk kemudian diolah menjadi lahan tanam sengon dan kopi, atau untuk digunakan sebagai kandang ternak. Selain itu, setelah pelaksanaan program PUAP, sebagian besar petani berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap hasil usaha yang dilakukan.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari ada beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi dalam hasil penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis evaluasi dampak yang digunakan adalah *after only* yang hanya berfokus pada setelah program diimplementasikan tanpa mengetahui kondisi responden sebelum pelaksanaan program PUAP
2. Susah teramatinya apakah keberdayaan petani murni disebabkan karena program PUAP. Hal ini disebabkan masyarakat terdampak juga mendapat bantuan maupun pendampingan dari institusi lain
3. Metode penyebaran kuesioner dilakukan secara *purposive* yang menyebabkan dampak yang terjadi pada responden, tidak dapat digeneralisasikan kepada semua anggota Gapoktan.

5.3 Saran

1. Penelitian yang menggunakan kajian dampak kebijakan sebaiknya menggunakan metode evaluasi *before-after* sehingga dampak program dapat lebih teramati
2. Rentang waktu penelitian dengan pelaksanaan program tidak lebih dari lima tahun, sehingga responden dapat mengingat jelas terkait dengan pelaksanaan program
3. Pemilihan responden dilakukan secara random, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai generalisasi terhadap semua populasi.

LAMPIRAN 1. KUESIONER

Kepada:

Yang terhormat bapak/ibu/saudara
Anggota/Pengurus Gapoktan Usaha Jaya
Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo
Kabupaten Jember

Dengan Segala Hormat,

Saya yang bernama Khoirul Fanani, mahasiswa tingkat akhir jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sedang melakukan penelitian di Gapoktan Usaha Jaya, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dalam rangka penyelesaian tugas akhir/ skripsi. Penelitian saya ini berjudul: ” Evaluasi Dampak Pemberdayaan Petani melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Studi Kasus pada Gapoktan Usaha Jaya, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)”.

Demi kelancaran proses penelitian ini, sudi kiranya saudara meluangkan waktu untuk mengisi pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini. Jawaban dari saudara akan saya jaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, saya mengharapkan kesediaan saudara dalam memberikan jawaban yang dianggap paling benar. Atas kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti,



Khoirul Fanani

KUESIONER

Judul Penelitian : Evaluasi Dampak Pemberdayaan Petani melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Studi Kasus pada Gapoktan Usaha Jaya, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)

Lokas Penelitian : Gapoktan Usaha Jaya, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nomor :(diisi oleh peneliti)

Tanggal :

Nama :

Umur : tahun

Jenis Kelamin :

1. Pendidikan terakhir :

Tidak sekolah Tamat SD

Tamat SMP/MTs Tamat SMA/SMK/MA

Tamat Perguruan tinggi (D3/S1/S2/S3)

Nama Kelompok Tani :

Tahun bergabung dengan Gapoktan :

Status pada Gapoktan : Pengurus Anggota

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Mohon dibaca pertanyaan dengan teliti
 2. Isilah jawaban dengan jujur
 3. Berikan tanda centang (✓) pada pilihan pernyataan yang sesuai menurut saudara
- SS : apabila saudara Sangat Setuju dengan pernyataan
- S : apabila saudara Setuju dengan pernyataan

RG : apabila saudara Ragu-ragu dengan pernyataan

TS : apabila saudara Tidak Setuju dengan pernyataan

STS : apabila saudara Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan

III. TIPE PERTANYAAN PERTAMA

A. Bina Manusia

Sikap Kewirausahaan

| No | Item Pertanyaan | Skala | | | | |
|----|--|-------|---|----|----|-----|
| | | SS | S | RG | TS | STS |
| 1 | Setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan kegiatan PUAP, saya mengetahui bahwa Desa Sidomulyo memiliki lahan pertanian yang bagus | | | | | |
| 2 | Setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan kegiatan PUAP, saya mengetahui bahwa Kopi merupakan komoditas unggulan di Desa Sidomulyo | | | | | |
| 3 | Setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan kegiatan PUAP, Saya berani mengambil resiko terhadap usaha yang akan saya lakukan | | | | | |
| 4 | Setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan kegiatan PUAP, saya berusaha untuk melakukan perbaikan terhadap hasil panen yang saya lakukan | | | | | |

Sikap Profesionalisme

| No | Item Pertanyaan | Skala | | | | |
|----|---|-------|---|----|----|-----|
| | | SS | S | RG | TS | STS |
| 5 | Setelah proses pendampingan program PUAP, saya mendapatkan pemahaman bahwa petani merupakan pekerjaan yang penting | | | | | |
| 6 | Setelah proses pendampingan program PUAP, saya mendapatkan pemahaman bahwa menjadi petani merupakan suatu kebanggaan | | | | | |
| 7 | Setelah proses pendampingan program PUAP, saya mendapatkan pemahaman bahwa saya masih perlu belajar banyak tentang masalah pertanian | | | | | |
| 8 | Setelah proses pendampingan program PUAP, saya mendapatkan pemahaman bahwa dalam menjual hasil pertanian ada aturan yang harus saya ikuti | | | | | |
| 9 | Setelah proses pendampingan program PUAP, saya berusaha mengikuti sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh institusi lain | | | | | |

Sikap Kemandirian

| No | Item Pertanyaan | Skala | | | | |
|----|-----------------|-------|---|----|----|-----|
| | | SS | S | RG | TS | STS |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 10 | Setelah pelaksanaan program PUAP, saya menentukan sendiri jenis komoditas yang akan saya tanam | | | | | |
| 11 | Setelah pelaksanaan program PUAP, saya mendapatkan pemahaman terkait dengan jenis pupuk yang akan saya gunakan | | | | | |
| 12 | Selama pelaksanaan program PUAP, saya meminjam dana sesuai keputusan saya sendiri | | | | | |
| 13 | Meskipun bantuan PUAP membantu saya dalam mendapatkan modal, saya menghindari untuk terus mengandalkan bantuan dari pemerintah | | | | | |

Peningkatan Posisi Tawar Menawar

| No | Item Pertanyaan | Skala | | | | |
|----|---|-------|---|----|----|-----|
| | | SS | S | RG | TS | STS |
| 14 | Selama pelaksanaan program PUAP, saya mendapatkan pemahaman bahwa menjalin kerjasama dengan lembaga lain dibutuhkan | | | | | |
| 15 | Setelah pelaksanaan program PUAP, Gapoktan menjalin kerjasama dengan institusi perbankan | | | | | |
| 16 | Setelah pelaksanaan program PUAP, Gapoktan menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 17 | Setelah pelaksanaan program PUAP, Gapoktan menjalin kerjasama dengan perusahaan | | | | | |
| 18 | Setelah pelaksanaan program PUAP, Gapoktan berusaha untuk mengundang pejabat pemerintah untuk memberikan pengarahan tentang pertanian | | | | | |
| 19 | Setelah pelaksanaan program PUAP, Gapoktan berusaha mendapatkan bantuan keuangan yang lebih besar kepada perbankan | | | | | |

B. BINA USAHA

| No | Item Pertanyaan | Skala | | | | |
|----|---|-------|---|----|----|-----|
| | | SS | S | RG | TS | STS |
| 20 | Setelah pelaksanaan program PUAP, saya mendapatkan pemahaman bahwa pemilihan komoditas usaha merupakan hal yang penting | | | | | |
| 21 | Setelah pelaksanaan program PUAP, saya mendapatkan pemahaman bahwa pemilihan komoditas harus didasarkan pada kondisi pasar yang sedang terjadi | | | | | |
| 22 | Setelah pelaksanaan program PUAP, saya mendapatkan pemahaman bahwa pemilihan komoditas harus didasarkan pada kondisi lingkungan yang sedang terjadi | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 23 | Setelah pelaksanaan program PUAP, saya menyisihkan uang dari hasil panen untuk diinvestasikan | | | | | |
| 24 | Setelah pelaksanaan program PUAP, saya membeli alat produksi pertanian yang lebih baik | | | | | |
| 25 | Setelah pelaksanaan program PUAP, saya mendapatkan pemahaman tentang pentingnya membahas perencanaan keuangan kelompok tani | | | | | |
| 26 | Setelah pelaksanaan program PUAP, saya mendapatkan pemahaman tentang pentingnya melakukan pengendalian terhadap dana Gapoktan yang dipinjam Petani | | | | | |
| 27 | Setelah pelaksanaan program PUAP, saya melakukan perbaikan pada sarana produksi pertanian | | | | | |

LAMPIRAN 2. HASIL REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

Sikap Kewirausahaan

| No | X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | Total |
|----|------|------|------|------|-------|
| 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 18 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 19 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
| 21 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 22 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 23 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 24 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |

Sikap Profesionalisme

| No | X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | Total |
|----|------|------|------|------|------|-------|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 17 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 21 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 19 |
| 22 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |

Sikap Kemandirian

| No | X3.1 | X3.2 | X3.3 | X3.4 | Total |
|----|------|------|------|------|-------|
| 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 27 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |

Posisi Tawar Menawar

| No | X4.1 | X4.2 | X4.3 | X4.4 | X4.5 | X4.6 | Total |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 19 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 21 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 14 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 19 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 |
| 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 21 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 24 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| 28 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |

LAMPIRAN 3. HASIL UJI VALIDITAS

Sikap Kewirausahaan

| | | x1 | x2 | x3 | x4 | total |
|-------|---------------------|-------|------|------|-------|-------|
| x1 | Pearson Correlation | 1 | ,081 | ,290 | -,222 | ,499 |
| | Sig. (2-tailed) | | ,669 | ,120 | ,238 | ,005 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| x2 | Pearson Correlation | ,081 | 1 | ,375 | ,245 | ,611 |
| | Sig. (2-tailed) | ,669 | | ,041 | ,192 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| x3 | Pearson Correlation | ,290 | ,375 | 1 | ,697 | ,896 |
| | Sig. (2-tailed) | ,120 | ,041 | | ,000 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| x4 | Pearson Correlation | -,222 | ,245 | ,697 | 1 | ,620 |
| | Sig. (2-tailed) | ,238 | ,192 | ,000 | | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| total | Pearson Correlation | ,499 | ,611 | ,896 | ,620 | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,005 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Sikap Profesionalisme

| | | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | TOTAL |
|----|---------------------|----|------|------|------|------|-------|
| X1 | Pearson Correlation | 1 | ,929 | ,604 | ,503 | ,536 | ,878 |
| | Sig. (2-tailed) | | ,000 | ,000 | ,005 | ,002 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| X2 | Pearson Correlation | ,929 | 1 | ,703 | ,526 | ,569 | ,913 |
| | Sig. (2- tailed) | ,000 | | ,000 | ,003 | ,001 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X3 | Pearson Correlation | ,604 | ,703 | 1 | ,560 | ,714 | ,854 |
| | Sig. (2- tailed) | ,000 | ,000 | | ,001 | ,000 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X4 | Pearson Correlation | ,503 | ,526 | ,560 | 1 | ,469 | ,721 |
| | Sig. (2- tailed) | ,005 | ,003 | ,001 | | ,009 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X5 | Pearson Correlation | ,536 | ,569 | ,714 | ,469 | 1 | ,783 |
| | Sig. (2- tailed) | ,002 | ,001 | ,000 | ,009 | | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| TOTAL | Pearson Correlation | ,878 | ,913 | ,854 | ,721 | ,783 | 1 |
| | Sig. (2- tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Sikap Kemandirian

| | | X1 | X2 | X3 | X4 | TOTAL |
|----|------------------------|------|------|------|-------|-------|
| X1 | Pearson Correlation | 1 | ,588 | ,512 | -,433 | ,738 |
| | Sig. (2- tailed) | | ,001 | ,004 | ,017 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X2 | Pearson Correlation | ,588 | 1 | ,829 | -,478 | ,869 |
| | Sig. (2- tailed) | ,001 | | ,000 | ,008 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | |
|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| X3 | Pearson Correlation | ,512 | ,829 | 1 | -,530 | ,846 |
| | Sig. (2-tailed) | ,004 | ,000 | | ,003 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X4 | Pearson Correlation | -,433 | -,478 | -,530 | 1 | -,226 |
| | Sig. (2-tailed) | ,017 | ,008 | ,003 | | ,230 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| TOTAL | Pearson Correlation | ,738 | ,869 | ,846 | -,226 | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,230 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Posisi Tawar Menawar

| | | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | TOTAL |
|----|---------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| X1 | Pearson Correlation | 1 | ,583 | ,626 | ,430 | -,146 | ,051 | ,703 |
| | Sig. (2-tailed) | | ,001 | ,000 | ,018 | ,440 | ,787 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X2 | Pearson Correlation | ,583 | 1 | ,783 | ,355 | ,000 | ,276 | ,760 |
| | Sig. (2-tailed) | ,001 | | ,000 | ,054 | 1,000 | ,140 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X3 | Pearson Correlation | ,626 | ,783 | 1 | ,397 | ,000 | ,247 | ,793 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | | ,030 | 1,000 | ,189 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X4 | Pearson Correlation | ,430 | ,355 | ,397 | 1 | ,260 | ,170 | ,760 |
| | Sig. (2-tailed) | ,018 | ,054 | ,030 | | ,165 | ,370 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| X5 | Pearson Correlation | -,146 | ,000 | ,000 | ,260 | 1 | ,303 | ,376 |
| | Sig. (2-tailed) | ,440 | 1,000 | 1,000 | ,165 | | ,103 | ,041 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

LAMPIRAN 4. HASIL UJI RELIABILITAS

Sikap Kewirausahaan

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------|----|-------|
| Cases | Valid | 30 | 100,0 |
| | Excludeda | 0 | ,0 |
| | Total | 30 | 100,0 |

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,542 | 4 |

Sikap Profesionalisme

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------|----|-------|
| Cases | Valid | 30 | 100,0 |
| | Excludeda | 0 | ,0 |
| | Total | 30 | 100,0 |

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,888 | 5 |

Sikap Kemandirian

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------|----|-------|
| Cases | Valid | 30 | 100,0 |
| | Excludeda | 0 | ,0 |
| | Total | 30 | 100,0 |

Reliability Statistics

| | |
|------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,827 | 3 |

Posisi Tawar Menawar

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------|----|-------|
| Cases | Valid | 30 | 100,0 |
| | Excludeda | 0 | ,0 |
| | Total | 30 | 100,0 |

Reliability Statistics

| | |
|------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,827 | 3 |

Bina Usaha

| | | N | % |
|-------|-----------|----|-------|
| Cases | Valid | 30 | 100,0 |
| | Excludeda | 0 | ,0 |
| | Total | 30 | 100,0 |

Reliability Statistics

| | |
|------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,840 | 8 |

LAMPIRAN 5. GAPOKTAN PUAP KABUPATEN JEMBER

| No | Tahun PUAP | Kecamatan | Desa | Nama Gapoktan |
|----|------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2008 | Ambulu | Pontang | Ketan Emas |
| 2 | 2008 | Mayang | Tegal Rejo | Tretan |
| 3 | 2008 | Silo | Sido Mulyo | Usaha Jaya |
| 4 | 2008 | Umbulsari | Sido Rejo | Mulyo Abadi |
| 5 | 2009 | Jelbuk | Jelbuk | Serba Guna |
| 6 | 2009 | Pakusari | Kertosari | Permata II |
| 7 | 2010 | Tempurejo | Curah Nongko | Betiri Indah |
| 8 | 2010 | Jenggawah | Jati Mulyo | Mulyo Abadi |
| 9 | 2010 | Tanggul | Selodakon | Mutiara Tani |
| 10 | 2010 | Bangsalsari | Bangsalsari | Jaya Makmur |
| 11 | 2010 | Puger | Wringin Telu | Gerbangsari |
| 12 | 2010 | Sukowono | Sukorejo | Podo Makmur |
| 13 | 2010 | Sukowono | Sukosari | Tani Sejahtera |
| 14 | 2011 | Mayang | Mrawan | Sakinah (Koperasi) |
| 15 | 2011 | Panti | Kemuningsari Lor | Jaya Makmur |
| 16 | 2011 | Semboro | Semboro | Semboro |
| 17 | 2011 | Sumbersari | Antirogo | Cahaya Muda |
| 18 | 2011 | Sumberbaru | Jamintoro | Jamintoro |
| 19 | 2011 | Sumbrbaru | Karang Bayat | Harapan Jaya |
| 20 | 2011 | Sumberjambe | Cumedak | Sejahtera |
| 21 | 2011 | Wuluhan | Ampel | Ruas |
| 22 | 2011 | Ajung | Mangaran | Bina Rizki |
| 23 | 2011 | Bangsalsari | Langkap | Cahaya Tani |
| 24 | 2011 | Kencong | Kencong | Tani Murni |
| 25 | 2011 | Ambulu | Karang Anyar | Sumber Mulyo |
| 26 | 2011 | Jenggawah | Kemuningsari Kidul | Sumber Rejeki |
| 27 | 2011 | Tanggul | Tanggul Wetan | Lestari Tanggul Wetan |
| 28 | 2012 | Kaliwates | Mangli | Bina Tani |
| 29 | 2012 | Patrang | Banjar Sengon | Karisma |
| 30 | 2012 | Bangsalsari | Curah Katong | Fajar Tani |
| 31 | 2012 | Ledokombo | Lembengan | Sumber Rejeki |
| 32 | 2012 | Silo | Garahan | Garahan Jaya |
| 33 | 2012 | Semboro | Pondok Joyo | Podo Rukun |
| 34 | 2012 | Sumberbaru | Gelang | Galunggung |
| 35 | 2012 | Tanggul | Kramat Sukoharjo | Sukatani |
| 36 | 2012 | Tanggul | Darungan | Tani Makmur |
| 37 | 2012 | Ambulu | Andongsari | Sari Makmur |
| 38 | 2012 | Tempurejo | Curah Takir | Rukun tani |
| 39 | 2012 | Tempurejo | Pondok Rejo | Tani tangguh |

| | | | | |
|----|------|-------------|--------------|-------------------|
| 40 | 2012 | Wuluhan | Lojejer | Sumber Hasil |
| 41 | 2012 | Wuluhan | Taman sari | Sumber Rejeki |
| 42 | 2012 | Ambulu | Sumberrejo | Sumberejo |
| 43 | 2012 | Ledokombo | Slateng | Sejahtera |
| 44 | 2012 | Semboro | Rejo Agung | Jaya Agung |
| 45 | 2013 | Balung | Karangduren | Sumber makmur |
| 46 | 2013 | Bangsalsari | Gambirono | Gembira |
| 47 | 2013 | Jenggawah | Jatisari | Maju Jaya |
| 48 | 2013 | Kalisat | Patempuran | Kurnia |
| 49 | 2013 | Patrang | Bintoro | Hasil tani |
| 50 | 2013 | Sukorambi | Dukuh Mencek | Dukuh Mencek Jaya |
| 51 | 2013 | Sukorambi | Klungkung | Rengganis |
| 52 | 2013 | Kaliwates | Tegal Besar | Gotong Royong |
| 53 | 2013 | Wuluhan | Kesilir | Kesilir Jaya |
| 54 | 2013 | Tempurejo | Tempurejo | Tani Jaya |

Data diolah: Dinas Kabupaten Jember, 2016



LAMPIRAN 6. DOKUMENTASI



LAMPIRAN 7. SURAT EDARAN KEMENTERIAN PERTANIAN



KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

Nomor : 222/SK.210/B.4/05/2016

11 Mei 2016

Lampiran : 1 Eksp

Perihal : Tindak Lanjut Pembinaan Gapoktan PUAP 2008 - 2015

Yth.

1. Kepala Dinas Pertanian Propinsi di seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Penyaluran Dana BLM-PUAP (Bantuan Langsung Masyarakat - Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 telah berakhir, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah gapoktan penerima dana BLM-PUAP Tahun 2008 s/d 2015 sebanyak 52.186 gapoktan yang berada di seluruh Indonesia dengan total jumlah dana sebesar Rp. 5.218.600.000.000,- Pada Tahun 2016 Program BLM-PUAP sudah tidak dilaksanakan lagi.
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi (Ketua Tim Pembina PUAP) beserta seluruh anggota Tim Pembina PUAP tingkat Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (selaku Ketua Tim Teknis PUAP) beserta anggota tim teknis PUAP tingkat kabupaten/kota termasuk PMT (Penyelia Mitra Tani) diminta agar tetap melaksanakan tugas tindak lanjut pembinaan kepada seluruh gapoktan penerima BLM-PUAP di wilayah binaan masing-masing sehingga mampu membentuk LKM-A (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) yang berbadan hukum (softcopy daftar gapoktan PUAP terlampir).
3. Pelaporan pengembangan LKM-A disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktorat Pembiayaan Pertanian sesuai dengan Pedoman LKMA TA. 2016.

Demikian agar dapat dipedomani. Atas perhatiannya yang baik diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Sumarjo Gatot Irianto

NIP. 196010241987031001

Tembusan :

1. Menteri Pertanian R.I;
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Azwar, Saifuddin. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Berita Resmi Statistik No. 05/01/Th. XX*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi pertama*. Jakarta:Kencana.
- Carton RB, Hofer CW. 2010. *Measuring Organizational Performance: Metrics for Entrepreneurship and Strategic Management Research Massachusetts 01060*. Edward Elgar Publishing, Inc.
- Dunn, W.N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T.R. 1981. *Understanding Public Policy, Third Edition*. Englewood Cliffs: Prentice-Hal
- Direktorat Jenderal Pembiayaan Pertanian. 2013. *Laporan Penyaluran Dana PUAP 2012*. Jakarta (ID): Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Easton, David. 1965. *A Framework for Political Analysis*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.
- Islamy, M.I (2004). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, C.O. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Terjemahan R. Istamto. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Pertanian. 2010. *Petunjuk Teknis Pemeringkatan (Rating) Gapoktan PUAP Menuju LKM-A*. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2014. *Pedoman Pengembangan LKM-A Pada Gapoktan PUAP Tahun 2014*. Jakarta

- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Edisi Kelima. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mardikanto, T. dan P. Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Singarimbun, Masri. dan S. Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelakar.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Sdm (Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryahadi, Asep. (2007). *Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan. Modul 4 : Persyaratan dan Unsur-unsur Evaluasi yang Baik*. Jakarta: Bappenas
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wijaya, Toni. (2011). *Manajemen Kualitas Jasa. Desain Servqual, QFD, dan Kano Disertai Contoh Aplikasi dalam Kasus Penelitian*. Jakarta: PT. Indeks.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CPAS.

SKRIPSI

- Nurfaida, Siti. 2014. *Analisis Pendapatan dan Strategi Pengembangan Bantuan Langsung Masyarakat-Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Jember.
- Asnida, Mery. 2013. *Evaluasi Dampak Kebijakan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) Di Kabupaten Pesawaran: Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan*. Lampung: Universitas Lampung

TESIS

Hermawan, Hari. 2015. *Peran Progam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Terhadap Kinerja Gapoktan dan Pendapatan Usahatani Padi di Kabupaten Subang. Tesis*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Anggraini, T.W. 2012. *Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2015.

WEBSITE

<http://bisniskeungan.kompas.com/read/2011/09/09/16060093/Dana-PUAP-Masih-Dianggap-Hibah>.

<http://newspolkrim.wordpress.com/2016/06/14/usut-tuntas-ketidakjelasan-dana-puap-pematang-karau/>.

<http://republika.co.id/berita/kementan/berita-kementan/15/09/17/nut8u7368-jumlah-petani-miskin-bertambah-ini-kata-mentan>.

<http://travel.kompas.com/read/2010/05/21/17574631/Sinema.Kemiskinan.Petani.Jatim>.